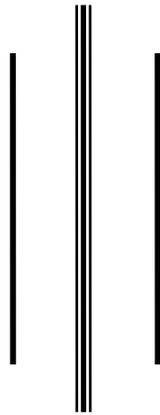


**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
TAHUN 2024**



PT BANK BUMI ARTA Tbk

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
I. Transparansi Penerapan Tata Kelola	3
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	3
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	20
3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	56
4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	70
5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	87
6. Rencana Strategis Bank	88
7. Kebijakan Dividen	91
8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.....	93
9. Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank	93
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (Lima Persen) atau Lebih dari Modal Disetor	94
C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris Lain, Pemegang Saham Pengendali Bank, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank....	95
D. Kebijakan Remunerasi	97
1. Komite Remunerasi dan Nominasi	97
2. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi	98
3. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per Unit Bisnis, Perwilayah dan pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi di Luar Negeri	100
4. Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko.....	100
5. Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi.....	100
6. Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko.....	101
7. Konsultan Ekstern Terkait Kebijakan Remunerasi	101
8. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris	102
9. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.....	103
10. Remunerasi yang Bersifat Variabel.....	103
11. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel	104
12. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi <i>Material Risk Takers</i>	104
13. <i>Shares Option</i>	105
14. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	106

15. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan oleh Bank kepada Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai Selama 1 (Satu) Tahun Pertama Bekerja	106
16. Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Nominal Pesangon yang Dibayarkan	107
17. Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	107
18. Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan	108
19. Jumlah Remunerasi yang Diberikan.....	108
20. Informasi Kuantitatif.....	109
E. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	110
F. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>)	111
G. Permasalahan Hukum	112
H. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	113
I. Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank	113
J. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik	114
II. Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola.....	115

Lampiran I Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Pendahuluan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2024 memuat kata “Bank dan “Bank Bumi Arta”, yang didefinisikan sebagai PT Bank Bumi Arta Tbk, yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam industri perbankan.

Bank Bumi Arta senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta menjunjung tinggi etika dan integritas dalam setiap aspek pengelolaan Bank. Komitmen ini diwujudkan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perbankan dan Pasar Modal.

Bank Bumi Arta dalam rangka pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang selaras dengan *best practices*, secara berkesinambungan meningkatkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang andal serta dapat menjamin akuntabilitas yang sepadan dengan risiko usaha yang dihadapi. Selain itu pengembangan Tata Kelola Perusahaan juga untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, melalui peningkatan *shareholder value* secara maksimal.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank Bumi Arta berlandaskan pada lima prinsip dasar yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Prinsip ini diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh aktivitas dan jenjang organisasi.

Pelaksanaan Tata Kelola di Bank Bumi Arta berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024

No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Bank Bumi Arta berkomitmen melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Bersama ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Bumi Arta tahun 2024 yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- I. Transparansi Penerapan Tata Kelola.
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola.

Jakarta, 29 April 2025
PT BANK BUMI ARTA Tbk



Wikan Aryono S.
Presiden Direktur

Edwin Suryahusada
Direktur

I. Transparansi Penerapan Tata Kelola

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Peranan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan publik adalah sangat penting. Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris ini pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola serta kebijakan intern Bank Bumi Arta yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan Bank Bumi Arta.

- a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Direksi Bank Bumi Arta sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari:

- 1) Wikan Aryono S sebagai Presiden Direktur
- 2) Hendrik Atmaja sebagai Direktur Kredit & Marketing
- 3) John David Nehemia Engelen sebagai Direktur Kepatuhan
- 4) Edwin Suryahusada sebagai Direktur Pengembangan Bisnis & Keuangan
- 5) Aditya Putra Utama sebagai Direktur Perbankan Digital

Sedangkan jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Bumi Arta sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari :

- 1) Ir. Rachmat M.S., MBA sebagai Presiden Komisaris
- 2) Daniel Budi Dharma sebagai Wakil Presiden Komisaris yang berasal dari Pihak Independen
- 3) R.M. Sjariffudin sebagai Komisaris yang berasal dari Pihak Independen
- 4) I Gst Agung Rai Wirajaya sebagai Komisaris

Presiden Direktur, Direktur Kepatuhan dan Direktur Perbankan Digital Bank Bumi Arta berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Seluruh anggota Direksi Bank Bumi Arta tidak merangkap jabatan di Bank Bumi Arta, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank Bumi Arta tidak merangkap jabatan di Bank Bumi Arta, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, kecuali Ir. Rachmat M.S., MBA yang saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Surya Husada Investment dan I Gst Agung Rai Wirajaya yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Puri Kuta Beach dan khusus sebagai anggota Komisi XI DPR RI di DPR/MPR RI masih dirangkap sampai dengan 30 September 2024.

Tidak ada Komisaris Independen yang perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) dan pengangkatan terakhir dari 2 (dua) Komisaris Independen adalah pada RUPS Tahunan pada tanggal 19 Juni 2024 dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.

- b. Etika Kerja, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris
 - 1) Etika Kerja, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Bank Bumi Arta, Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Bumi Arta. Dalam mencapai maksud dan tujuannya Direksi mewakili Bank Bumi Arta secara sah dan secara langsung baik

di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank Bumi Arta dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank Bumi Arta serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan tertentu.

Kebijakan intern Bank Bumi Arta yang mengatur mengenai praktek Tata Kelola yang baik untuk etika kerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagai berikut :

a) Etika Kerja Direksi

- (1) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- (4) Anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- (5) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.

- (6) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- (7) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Bank selain penghasilan yang sah, remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (8) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima, sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- (9) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (a) Untuk proyek bersifat khusus.
 - (b) Didasari kontrak yang jelas, sekurang-kurangnya mencakup antara lain:
 - i. Lingkup kerja
 - ii. Tanggung jawab
 - iii. Jangka waktu pekerjaan
 - iv. Biaya
- (10) Merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) huruf (a).
- (11) Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran jangka pendek dan menengah maupun jangka panjang.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- (5) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan Bank dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- (6) Direksi wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (7) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- (8) Direksi wajib menindaklanjuti himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris mengenai Hasil Rapat Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

- (9) Direksi wajib membuat laporan tertulis yang disertai data pendukung mengenai tindak lanjut Direksi atas himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris.
- (10) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- (11) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- (12) Dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik, Direksi paling sedikit wajib membentuk :
 - (a) Satuan Kerja Audit Intern;
 - (b) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - (c) Satuan Kerja Kepatuhan;
- (13) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- (14) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- (15) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- (16) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud angka 15 (lima belas), apabila dapat membuktikan :
 - (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;

- (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (17) Direksi akan melakukan evaluasi/penilaian kinerja Direksi yang dilaksanakan sekali setiap tahun dengan cara *self assessment* untuk kemudian *direview* oleh Dewan Komisaris.
- (18) Anggota Direksi wajib menyampaikan informasi kepada Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank serta wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Bank.
- (19) Bertanggung jawab terhadap Implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Prinsip Keuangan Berkelanjutan.
- c) Wewenang Direksi
- (1) Direksi berwenang mewakili Bank di dalam dan diluar pengadilan.
 - (2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank, apabila :
 - (a) terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - (b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.
 - (3) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) diatas, maka yang berhak mewakili Bank adalah :
 - (a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;
 - (b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau

(c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.

2) Etika Kerja, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank Bumi Arta bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan atas kebijakan Direksi dalam pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank Bumi Arta maupun usaha Bank Bumi Arta dan memberikan nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Kebijakan intern Bank Bumi Arta yang mengatur mengenai praktek Tata Kelola yang baik untuk etika kerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

a) Etika Kerja Dewan Komisaris

- (1) Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris wajib dilakukan secara independen dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- (2) Dewan Komisaris wajib tetap bersikap profesional apabila dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terdapat benturan kepentingan dengan Bank.
- (3) Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Bank mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan terbuka termasuk

Bank, baik langsung maupun tidak langsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Bank.

- (4) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- (6) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- (7) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Bank selain penghasilan yang sah, Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- (8) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan Remunerasi atau fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS sebagaimana dimaksud angka 7 (tujuh) pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- b) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola (termasuk Tata Kelola Keberlanjutan) yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - (2) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 - (3) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 - (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit :
 - (a) Komite Audit;
 - (b) Komite Pemantau Risiko;
 - (c) Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - (5) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
 - (6) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) setiap akhir tahun buku.

- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
- (8) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- (9) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) apabila dapat membuktikan :
 - (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
 - (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (10) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, himbauan Dewan Komisaris kepada Direksi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

- (11) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- (12) Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi/penilaian atas kinerja Direksi yang dilaksanakan sekali setiap tahun dengan cara *self assessment* dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- (13) Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi/penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan sekali setiap tahun dengan cara *self assessment*.
- (14) Dewan Komisaris mengevaluasi dan memberi persetujuan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.
- (15) Dewan Komisaris mengawasi implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk mengembangkan dukungan pada pembangunan berkelanjutan.
- (16) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

- c) Wewenang Dewan Komisaris
- (1) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
 - (2) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud antara lain dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, atau dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara.
 - (3) Wewenang sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) di atas ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
 - (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud poin 2) butir b) angka 2 (dua) pada Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali:
 - (a) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - (b) hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - (6) Meminta Direksi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran jangka pendek dan menengah (*business plan*) maupun jangka panjang (*corporate plan*).
 - (7) Memantau dan melakukan *review/evaluasi* terhadap kinerja Direksi dalam merealisasikan Rencana Bisnis Bank setiap

semester yang disertai dengan data pendukung atas *review/evaluasi* tersebut.

(8) Mengusulkan kepada RUPS berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk dan memberhentikan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

(9) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi wajib memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan hasil Rapat Dewan Komisaris maupun sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi atas pelaksanaan tugas Direksi sesuai hasil rapat Dewan Komisaris yang membahas hasil rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

d. Pernyataan Independensi Anggota Komisaris Independen

Semua anggota Dewan Komisaris Independen yang menjabat saat ini telah memenuhi persyaratan Komisaris Independen dan masing-masing Komisaris Independen telah menandatangani pernyataan independensi yang dibuat dan diperbaharui secara berkala.

Pada RUPS Tahunan Bank Bumi Arta tahun 2024 terdapat pengangkatan kembali Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka masing-masing anggota Komisaris Independen yang diangkat kembali telah menyatakan independensinya kepada RUPS, sebagai berikut : “Bahwa apabila dipercaya untuk diangkat kembali sebagai Wakil Presiden Komisaris/Anggota Komisaris merangkap Komisaris Independen, dengan ini menyatakan akan tetap independen dalam menjalankan jabatan yang dipercayakan kepadanya.”

Surat Pernyataan Independensi masing-masing anggota Komisaris telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan Surat Pernyataan sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Daniel Budi Dharma
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 23 Desember 1944
Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir)	: Cempaka Putih Tengah 26 B/59, RT.004, RW. 006, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Nomor telepon rumah	: (021) 65836136
Jabatan	: Wakil Presiden Komisaris
Nama perusahaan	: P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Nomor telepon perusahaan	: (021) 2300893

Sehubungan dengan pencalonan saya kembali sebagai Komisaris Independen P.T. Bank Bumi Arta Tbk. (“Perseroan”) yang sudah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan selama lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian Surat Pernyataan Independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 19 Juni 2024

Mengetahui,



Wikan Aryono S
Presiden Direktur



Daniel Budi Dharma

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mohammad Sjariffudin
Tempat/tanggal lahir	: Palembang, 03 Maret 1947
Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir)	: Villa Cibubur Indah Blok U 2/3 RT.006, RW. 011, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur
Nomor telepon rumah	: (021) 87755436
Jabatan	: Komisaris
Nama perusahaan	: P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Nomor telepon perusahaan	: (021) 2300893

Sehubungan dengan pencalonan saya kembali sebagai Komisaris Independen P.T. Bank Bumi Arta Tbk. ("Perseroan") yang sudah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan selama lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian Surat Pernyataan Independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 19 Juni 2024

Mengetahui,



Wikan Aryono S
Presiden Direktur



Mohammad Sjariffudin

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Komite Dewan Komisaris

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

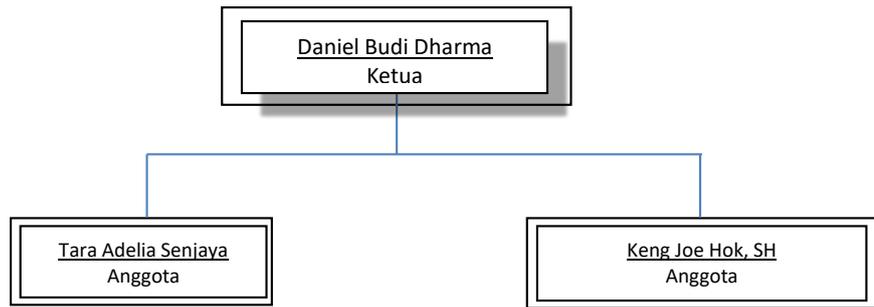
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite-Komite tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan efektif dan optimal. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja anggota Komite-Komite penunjang tugasnya, yang didasarkan pada pencapaian kinerja Komite yang dinilai dalam rekomendasi Komite kepada Dewan Komisaris, kompetensi Komite yang dinilai dalam pelatihan/training yang telah dilakukan dan kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite.

1) Komite Audit

a) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit

Komite Audit dibentuk pada tanggal 30 Juni 2006 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2006.

Seluruh anggota Komite Audit telah diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR/400/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, sehingga terhitung sejak tanggal 19 Juni 2024 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Audit terdiri dari :

- (1) Daniel Budi Dharma sebagai Ketua dan Pihak Independen, merupakan Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- (2) Tara Adelia Senjaya sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi dan manajemen risiko.
- (3) Keng Joe Hok, SH sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang hukum.

Keahlian anggota Komite Audit berdasarkan riwayat hidup anggota Komite dari pendidikan dan pengalaman kerja masing-masing anggota Komite.

b) Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- (1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.

- (2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- (3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
- (4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan :
 - (a) independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan orang dalam Kantor Akuntan Publik;
 - (b) ruang lingkup audit;
 - (c) imbalan jasa audit;
 - (d) keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;
 - (e) metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik;
 - (f) manfaat sudut pandang baru (*fresh eye perspectives*) yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;
 - (g) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang;
 - (h) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya, apabila ada.

- (5) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit dilakukan paling sedikit memuat :
 - (a) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - (b) kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - (c) pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
 - (d) rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- (6) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- (7) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- (8) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- (9) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - (a) perencanaan dan pelaksanaan audit; dan
 - (b) pemantauan atas tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- (10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap :
 - (a) pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - (b) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

(c) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

(11) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

(12) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

c) Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

(1) Mengakses dokumen, data dan informasi Bank tentang pegawai, dana, aset dan sumber daya Bank yang diperlukan.

(2) Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

(3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

(4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024

d) Frekuensi rapat Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu. Rapat Komite Audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite Audit.

e) Program Kerja Komite Audit dan realisasinya

Selama tahun 2024 Komite Audit telah :

- (1) Menyelenggarakan 15 (lima belas) kali rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit baik secara fisik maupun telekonferensi.

Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat selama periode tahun 2024.

Komite Audit (Tanggal)	Tw1				Tw2		
	24/1/24	23/2/24	4/3/24	19/3/24	30/4/24	28/5/24	25/6/24
Daniel Budi Dharma, Ketua	√	√	√	√	√	√	√
Keng Joe Hok, SH, Anggota	√	√	√	√	√*	√*	√
Tara Adelia Senjaya, Anggota	√	√	√	√	√*	√*	√

Komite Audit (Tanggal)	Tw3			Tw4				
	23/7/24	27/8/24	23/9/24	28/10/24	28/10/24	26/11/24	12/12/24	23/12/24
Daniel Budi Dharma, Ketua	√	√	√	√	√	√	√	√
Keng Joe Hok, SH, Anggota	√	√	√	√	√	√	√	√*
Tara Adelia Senjaya, Anggota	√	√	√	√	√	√	√	√*

*telekonferensi

Pengambilan keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau jika tidak terjadi musyawarah mufakat dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat dan telah didokumentasikan dengan baik. Komite Audit telah menyampaikan memorandum kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang menjadi perhatian Komite Audit berdasarkan Hasil Rapat Komite Audit.

- (2) Melakukan kegiatan – kegiatan antara lain :
- (a) Melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan SKAI tahun 2023 di Kantor Cabang Medan, Kantor Cabang Bandar Lampung dan pemeriksaan Teknologi Informasi.
 - (b) Melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan SKAI tahun 2024 yaitu Kantor Cabang Wahid Hasyim, Kantor Cabang Mangga Dua, Kantor Cabang Bandung, Kantor Cabang Semarang, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Medan, Kantor Cabang Denpasar, Kantor Pusat, pemeriksaan Teknologi Informasi terhadap pengembangan dan pengadaan Layanan Perbankan Digital, Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN), *Single Customer View* (SCV) Lembaga Penjamin Simpanan.
 - (c) Evaluasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas audit Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - (d) Usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas audit Laporan Keuangan Bank untuk

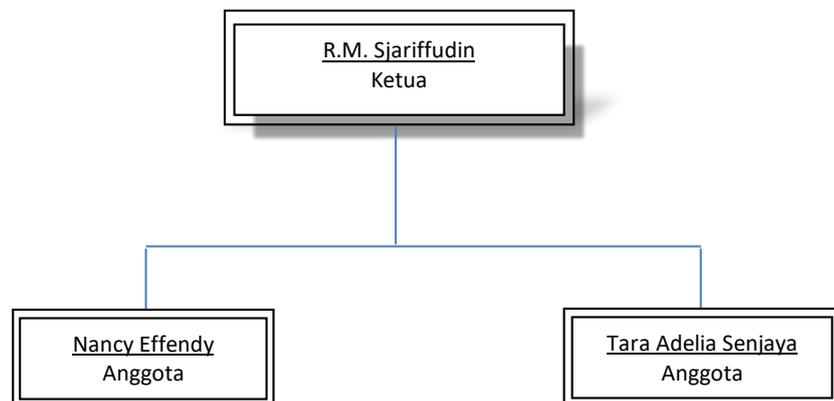
- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (e) Melakukan pembahasan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
 - (f) Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik untuk pembahasan hasil audit Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - (g) Melakukan pembahasan Rencana Kerja SKAI tahun 2025.
 - (h) Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik untuk rencana pemeriksaan audit Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - (i) Melakukan pembahasan mengenai revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, revisi Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter), POJK Nomor 15 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
 - (j) Melakukan pembahasan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2024.
- f) Periode Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit
- Bank Bumi Arta melakukan peninjauan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (Piagam Komite Audit) secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan/perubahan peraturan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (Piagam Komite Audit) terakhir diperbaharui pada tanggal 9 Desember 2024.

2) Komite Pemantau Risiko

a) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tanggal 16 April 2007 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2007.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR/399/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, sehingga terhitung sejak tanggal 19 Juni 2024 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari :

- (1) R.M. Sjariffudin sebagai Ketua dan Pihak Independen, merupakan Komisaris merangkap Komisaris Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- (2) Nancy Effendy sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan dan manajemen risiko.
- (3) Tara Adelia Senjaya, sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi dan manajemen risiko.

Keahlian anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan riwayat hidup anggota Komite dari pendidikan dan pengalaman kerja masing-masing anggota Komite.

b) Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

(1) Melakukan :

- (a) evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank; dan
- (b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

(2) Melakukan evaluasi (*assessment*) berdasarkan kondisi risiko di lapangan, antara lain mempertimbangkan :

- (a) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK);
- (b) Sumber Daya Manusia dari sisi kompetensi dan integritas;
- (c) kecukupan sarana dan prasarana kantor;
- (d) informasi dari pihak lain yang terkait aktivitas operasional yang terekspos risiko;

(3) Wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi pengujian (*stress testing*).

(4) Melakukan pemantauan atas risiko terkait iklim, siber, teknologi informasi, *outsourcing* dan perkembangan risiko lainnya di bidang perbankan.

c) Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut :

- (1) Mengakses data, dokumen dan informasi Bank terkait pegawai, dana, aset dan sumber daya Bank yang diperlukan;
- (2) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas Komite Pemantau Risiko; dan
- (3) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan apabila dianggap perlu. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko.

e) Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya

Selama tahun 2024 Komite Pemantau Risiko telah :

- (1) Menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko baik secara fisik maupun telekonferensi.

Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam pertemuan selama tahun 2024.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024

Komite Pemantau Risiko (Tanggal)	Tw1			Tw2		
	24/01/24	23/02/24	26/03/24	30/04/24	28/05/24	25/06/24
R.M. Sjariffudin, Ketua	√	√	√	√	√	√
Nancy Effendy, Anggota	√	√	√	√	√	√*
Tara Adelia Senjaya, Anggota	√	√	√*	√*	√*	√

Komite Pemantau Risiko (Tanggal)	Tw3			Tw4		
	23/07/24	27/08/24	25/09/24	28/10/24	21/11/24	19/12/24
R.M. Sjariffudin, Ketua	√	√	√	√	√	√*
Nancy Effendy, Anggota	√	√	√	√	√	√*
Tara Adelia Senjaya, Anggota	√	√	√	√	√	√*

* telekonferensi

Pengambilan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau jika tidak terjadi musyawarah mufakat dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam Risalah Rapat dan telah didokumentasikan dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan memorandum kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang menjadi perhatian Komite Pemantau Risiko berdasarkan Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko.

- (2) Melakukan kegiatan – kegiatan antara lain :
- (a) Membahas laporan Profil Risiko posisi 31 Desember 2023, 31 Januari 2024 sampai dengan 30 November 2024.

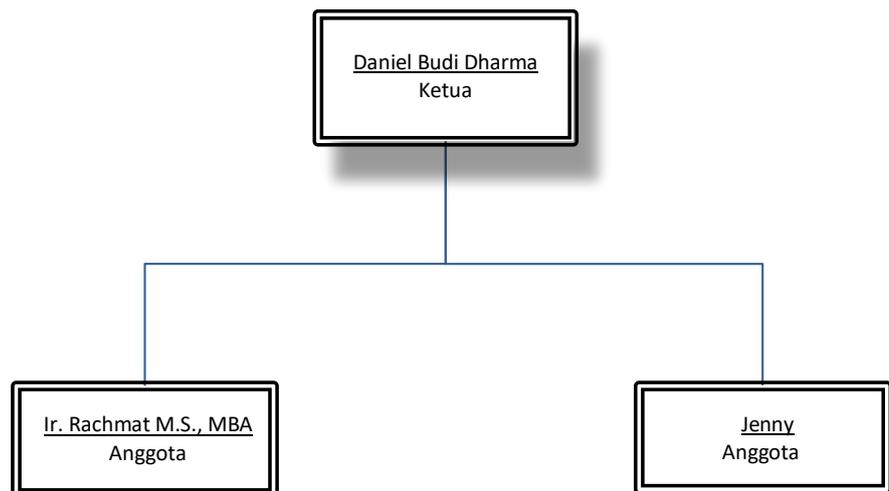
- (b) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - (c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - (d) Melakukan kajian (*assessment*) berdasarkan kondisi risiko di lapangan, antara lain dengan mempertimbangkan BWMK, SDM, kecukupan sarana dan prasarana kantor, informasi dari pihak lain yang terkait aktivitas operasional yang terekspos risiko manajemen.
- f) Periode Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko
- Bank Bumi Arta melakukan peninjauan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (Piagam Komite Pemantau Risiko) secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan/perubahan peraturan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (Piagam Komite Pemantau Risiko) terakhir diperbaharui pada tanggal 9 Desember 2024.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

a) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk pada tanggal 16 April 2007 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2007.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR/398/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, sehingga terhitung sejak tanggal 19 Juni 2024 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari :

- (1) Daniel Budi Dharma sebagai Ketua dan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- (2) Ir. Rachmat M.S., MBA. sebagai Anggota dan menjabat sebagai Presiden Komisaris, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.

- (3) Jenny sebagai Anggota dan menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, serta memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia.

Keahlian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan riwayat hidup anggota Komite dari pendidikan dan pengalaman kerja masing-masing anggota Komite.

- b) Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- (1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi

- (a) melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;

- (b) menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

- i. struktur Remunerasi, yang dapat berupa :

- (i) gaji;
- (ii) honorarium;
- (iii) insentif; dan/atau
- (iv) tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

- ii. kebijakan atas Remunerasi bagi:

- (i) anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
- (ii) pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- iii. besaran atas Remunerasi;
- (c) memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (d) melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi;
- (e) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

(2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi

- (a) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- (b) mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS;
- (c) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko;
- (d) menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- (e) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- ii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (f) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c) **Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi**
- Dalam melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut :
- (1) Mengakses data, dokumen dan informasi Bank terkait pegawai, dana, aset dan sumber daya Bank yang diperlukan;
 - (2) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak - pihak yang terkait dengan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - (3) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) **Frekuensi rapat Komite**
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite, termasuk kehadiran 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

e) Program Kerja Komite dan realisasinya

Selama periode tahun 2024 Komite Remunerasi dan Nominasi telah :

- (1) Menyelenggarakan 4 (empat) kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara fisik maupun telekonferensi.

Kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam pertemuan selama tahun 2024.

Komite Remunerasi dan Nominasi (Tanggal)	Tw2		Tw3	Tw4
	29/04/24	08/05/24	05/07/24	13/12/24
Daniel Budi Dharma, Ketua	√	√	√	√
Ir. Rachmat M.S., MBA, Anggota	√*	√*	√*	√*
Jenny, Anggota	√	√	√	√

*telekonferensi

Pengambilan keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau jika tidak terjadi musyawarah mufakat dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam Risalah Rapat dan telah didokumentasikan dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan memorandum kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang menjadi perhatian Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

(2) Melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- (a) Melakukan evaluasi struktur, kebijakan dan besaran remunerasi.
- (b) Melakukan evaluasi atas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
- (c) Memberikan rekomendasi pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang masa jabatannya akan berakhir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2024 untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris guna mendapat persetujuan dalam RUPST Bank Bumi Arta pada tanggal 19 Juni 2024.
- (d) Memberikan rekomendasi remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris guna mendapat persetujuan dalam RUPST Bank Bumi Arta pada tanggal 19 Juni 2024.
- (e) Memberikan rekomendasi untuk penyusunan program pelatihan/training anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

f) Periode Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank melakukan peninjauan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi) secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan/perubahan peraturan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi) terakhir diperbaharui pada tanggal 19 Agustus 2024.

b. Komite Direksi

Bank Bumi Arta telah membentuk 6 (enam) Komite di bawah Direksi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu: *Assets and Liabilities Committee (ALCO)*, Komite Kredit *Treasury*, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit Kantor Pusat, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Manajemen Risiko.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2024, Direksi menilai bahwa Komite-Komite tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan efektif dan optimal. Direksi mengevaluasi kinerja anggota Komite-Komite penunjang tugasnya, yang didasarkan pada pencapaian kinerja Komite yang terlihat dalam hasil review atas analisa, penilaian dan rekomendasi Komite, kompetensi Komite yang terlihat dalam pelatihan/training yang telah dilakukan dan kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite.

1) *Assets and Liabilities Committee (ALCO)*

ALCO adalah komite yang dibentuk Direksi di Kantor Pusat untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

a) Susunan Keanggotaan ALCO.

Susunan keanggotaan ALCO terdiri dari :

- (1) Presiden Direktur
- (2) Direktur Kredit & Marketing
- (3) Direktur Pengembangan Bisnis & Keuangan
- (4) Direktur Perbankan Digital
- (5) Direktur Kepatuhan

- (6) *General Manager* Kredit
- (7) *General Manager Operation, Treasury & Kredit Support*
- (8) Kepala Divisi *Treasury*

b) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang ALCO.

ALCO mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan serta strategi pengelolaan likuiditas dan rentabilitas yang seimbang.
- (2) Bertanggung jawab atas pencapaian likuiditas dan rentabilitas Bank yang seimbang sesuai dengan ketentuan serta target keuntungan (laba), pertumbuhan neraca dan beberapa ukuran rentabilitas yang telah ditetapkan dalam anggaran dan Rencana Bisnis Bank (RBB).
- (3) Menilai, merencanakan dan mengambil langkah berupa kebijaksanaan dan *Action Plan* untuk mengerjar target dan Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan realisasi yang terjadi.
- (4) Mempertimbangkan kondisi keuangan Bank secara keseluruhan dan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk dapat merumuskan, mengevaluasi dan memutuskan *Pricing Strategy, Asset dan Liabilities* dengan tujuan untuk mengoptimalkan *Interest Margin/Spread* yang meliputi antara lain :
 - (a) *Pricing Lending Rate*
 - (b) *Pricing Deposit*
 - (c) *Pricing Produk dan Jasa Bank Lainnya*
 - (d) *Pricing Fund Transfer (RAK)*
- (5) Menilai, mengevaluasi *performance* Bank yang berkaitan dengan posisi gap (*Gap Management*) dalam kaitannya dengan fluktuasi tingkat suku bunga.

- (6) Mereview secara periodik posisi likuiditas Bank dan merumuskan besarnya presentasi likuiditas yang akan dipertahankan oleh Bank, serta merumuskan strategi pemeliharaan dana yang seimbang/merata.
- (7) Mereview secara periodik alokasi penempatan dana Bank pada aktiva yang menghasilkan (*earning asset*), mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya sesuai dengan manajemen risiko dan merumuskan pada alokasi dan *earning asset* yang optimal.
- (8) Mereview secara periodik sumber dana Bank dan merumuskan komposisi jenis-jenis sumber dana yang menghasilkan *cost of fund* yang optimal.
- (9) Mereview secara periodik posisi dan *exposure* Bank pada penempatan dana di pasar uang antar Bank dengan memperhatikan rasio-rasio keuangan dan *rating* dari *counterparty* untuk kemudian menetapkan limit global besarnya posisi aset Bank pada penempatan dana di pasar uang tersebut.
- (10) Mereview secara periodik posisi dan kualitas portofolio perkreditan dan menetapkan besarnya posisi *Loan to Funding* (LFR) yang akan diambil oleh Bank.
- (11) Melakukan pembahasan mengenai posisi permodalan Bank dalam upaya mencapai posisi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan *Capital Planning* yang cermat.
- (12) Melakukan rapat-rapat lainnya yang diisyaratkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada pasar uang ataupun perubahan-perubahan dari segi Peraturan Bank

Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang terjadi secara tiba-tiba.

c) Rapat ALCO

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas masalah-masalah rutin ataupun non rutin yang merupakan agenda rapat yang telah disetujui sebelumnya dan dapat mengadakan rapat diluar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu. Anggota ALCO yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Rapat ALCO diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite. Selama tahun 2024 ALCO telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat yang dihadiri oleh anggota ALCO.

d) Periode Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO

Bank Bumi Arta melakukan peninjauan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO (Piagam ALCO) secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan/perubahan peraturan yang berlaku serta kompleksitas usaha Bank. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO (Piagam ALCO) terakhir diperbaharui pada tanggal 19 Agustus 2024.

2) Komite Kredit *Treasury*

Komite Kredit *Treasury* adalah komite yang dibentuk Direksi di Kantor Pusat untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

a) Susunan Keanggotaan Komite Kredit *Treasury*.

Susunan keanggotaan Komite Kredit *Treasury* terdiri dari :

- (1) Direktur Pengembangan Bisnis & Keuangan
- (2) *General Manager* Kredit
- (3) *General Manager Operation, Treasury & Kredit Support*
- (4) Kepala Divisi Luar Negeri
- (5) Kepala Divisi *Treasury*

b) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit *Treasury*.

Komite Kredit *Treasury* mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Melakukan analisa, penilaian dan rekomendasi dengan menggunakan metode pengukuran berupa perhitungan/analisa kondisi keuangan termasuk rasio-rasio keuangan dari pihak ketiga (*counterparty*) untuk memutuskan suatu usulan mengenai pihak ketiga (*counterparty*) yang diberikan *plafond* Fasilitas *Money Market Line* termasuk *Foreign Exchange Line* dan pihak ketiga selaku *main dealer* yang akan dijalin kerjasama *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) dalam rangka Transaksi *Repurchase* (Repo).
- (2) Mengajukan hasil analisa, penilaian serta rekomendasi yang mencakup berbagai hal dari pihak ketiga (*counterparty*) antara lain kinerja, *market*, likuiditas, *profit and lost* yang diperoleh dan daftar pemeringkatan Bank kepada Pejabat Bank yang mempunyai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) untuk Fasilitas *Money Market Line* termasuk *Foreign Exchange Line* dan Transaksi Repo.
- (3) Mereview hasil analisa, penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) di atas, sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sekali untuk diberikan kepada Presiden Direktur.

c) Rapat Komite Kredit *Treasury*.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kredit *Treasury* mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat mengadakan rapat diluar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu. Anggota Komite Kredit *Treasury* yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Rapat Komite Kredit *Treasury* diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite. Pada tahun 2024 Komite Kredit *Treasury* telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat yang dihadiri oleh anggota Komite Kredit *Treasury*.

d) Periode Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit *Treasury*

Bank Bumi Arta melakukan peninjauan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit *Treasury* (Piagam Komite Kredit *Treasury*) secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan/perubahan peraturan yang berlaku serta kompleksitas usaha Bank. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit *Treasury* (Piagam Komite Kredit *Treasury*) terakhir diperbaharui pada tanggal 19 Agustus 2024.

3) Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang dibentuk Direksi di Kantor Pusat untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

a) Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan.

Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan terdiri dari :

- (1) Presiden Direktur
- (2) Direktur Kredit & Marketing
- (3) Direktur Pengembangan Bisnis & Keuangan
- (4) *General Manager* Kredit

b) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Merumuskan kebijakan umum dan strategi perkreditan Bank Bumi Arta dalam rangka penyusunan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- (2) Memantau kegiatan manajemen perkreditan Bank Bumi Arta untuk menjamin bahwa risiko dan komposisi “portfolio kredit” serta kewajiban-kewajiban kontinjen karena berbagai komitmen dan fasilitas yang diberikan benar-benar berada dalam batas kemampuan Bank Bumi Arta.
- (3) Memantau dan mengevaluasi berbagai kebijakan dan prosedur perkreditan yang berlaku di Bank Bumi Arta seperti dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran

Direksi, Kebijakan Perkreditan Bank Bumi Arta (KPBB), Buku Pedoman Kredit dan Prosedur (BPKP), serta pengarahan-pengarahan tertulis lainnya.

- (4) Secara khusus memantau dan menilai :
 - (a) perkembangan dan kualitas portfolio perkreditan secara keseluruhan;
 - (b) kesesuaian pelaksanaan kewenangan memutus kredit dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang berlaku;
 - (c) kesesuaian proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
 - (d) kesesuaian pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan
 - (e) kesesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
- (5) Bila diperlukan mengarahkan Divisi/ Bagian terkait dalam memfasilitasi antara lain :
 - (a) konsultasi bagi para pejabat kredit Bank Bumi Arta; dan
 - (b) sosialisasi dan/atau training terkait perkreditan.

c) Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kebijakan Perkreditan mengadakan rapat sesuai kebutuhan Bank. Anggota Komite Kebijakan Kredit yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite.

- d) Periode Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Perkreditan.

Bank Bumi Arta melakukan peninjauan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Perkreditan (Piagam Komite Kebijakan Perkreditan) secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan/perubahan peraturan yang berlaku serta kompleksitas usaha Bank. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Perkreditan (Piagam Komite Kebijakan Perkreditan) terakhir diperbaharui pada tanggal 19 Agustus 2024.

- 4) Komite Kredit Kantor Pusat

Komite Kredit Kantor Pusat adalah komite yang dibentuk Direksi di Kantor Pusat untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

- a) Susunan Keanggotaan Komite Kredit Kantor Pusat

Susunan keanggotaan Komite Kredit Kantor Pusat terdiri dari :

- (1) Wikan Aryono S, selaku Presiden Direktur;
- (2) Hendrik Atmaja, selaku Direktur Kredit & Marketing;
- (3) Edwin Suryahusada, selaku Direktur Pengembangan Bisnis & Keuangan;
- (4) Sonya Hennipuspa W, selaku *General Manager Kredit*;
- (5) Drs. Anton Mudjoputro, selaku *Deputy General Manager Kredit*;
- (6) Ethan Fam, selaku Kepala Divisi Kredit Umum

b) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit Kantor Pusat.

Komite Kredit Kantor Pusat mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Menilai dan memutuskan suatu usulan kredit umum yang diajukan ke Kantor Pusat dari Divisi Kredit Umum/Bagian Bisnis/Kantor Cabang/Cabang Pembantu yang melampaui Batas Wewenang Memutus Kredit dari Komite Kredit Kantor Cabang, maupun pengajuan kredit umum dari Divisi Kredit Umum.
- (2) Memutuskan suatu usulan kredit umum berdasarkan hasil analisa dari Divisi *Review & Remedial* Kredit Umum yang dituangkan secara tertulis (dalam bentuk Memo Intern) dan berdasarkan penjelasan lebih lanjut apabila dirasa perlu dari Divisi Kredit Umum/Bagian Bisnis/Pemimpin Kantor Cabang/Cabang Pembantu untuk kelengkapan data dan analisa usulan kredit yang diajukan ke Komite Kredit Kantor Pusat.
- (3) Pemberian Fasilitas Kredit Umum harus mendapat persetujuan dari minimal 2 (dua) orang pejabat sesuai dengan limit Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) untuk Fasilitas Kredit Umum.

c) Frekuensi rapat Komite Kredit Kantor Pusat.

Komite Kredit Kantor Pusat dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komite Kredit Kantor Pusat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komite Kredit Kantor Pusat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite Kredit Kantor Pusat.

d) Periode Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit Kantor Pusat

Bank Bumi Arta melakukan peninjauan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit Kantor Pusat (Piagam Komite Kredit Kantor Pusat) secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan/perubahan peraturan yang berlaku serta kompleksitas usaha Bank. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit Kantor Pusat (Piagam Komite Kredit Kantor Pusat) terakhir diperbaharui pada tanggal 19 Agustus 2024.

5) Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite yang dibentuk Direksi di Kantor Pusat untuk memberikan rekomendasi secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

a) Susunan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Susunan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:

- (1) Presiden Direktur, sebagai Ketua merangkap Anggota
- (2) Direktur Kredit & Marketing, sebagai Anggota
- (3) Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota
- (4) Direktur Pengembangan Bisnis & Keuangan, sebagai Anggota
- (5) Direktur Perbankan Digital, sebagai Anggota
- (6) *General Manager* Keuangan & Akunting sebagai Anggota
- (7) *General Manager Operation, Treasury & Kredit Support*, sebagai Anggota
- (8) *General Manager* Audit Intem/SKAI, sebagai Anggota
- (9) Kepala Divisi Teknologi Informasi, sebagai Anggota
- (10) Wakil Kepala Divisi Teknologi Informasi, sebagai Anggota
- (11) Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, sebagai Anggota
- (12) Kepala Divisi Kebijakan & Prosedur, sebagai Anggota
- (13) Divisi/Bagian yang ditunjuk secara khusus bila diperlukan, sebagai Anggota

b) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan :

- (1) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strstegis Korporasi Bank, dengan memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas dan hal-hal lain, yaitu :
 - (a) peta jalan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank, terdiri dari kondisi

saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;

- (b) sumber daya yang dibutuhkan;
 - (c) manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan; dan
 - (d) kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategi TI.
- (2) Perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama, seperti kebijakan TI yang utama yaitu kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
 - (3) Kesesuaian antara rencana pengembangan TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah Teknologi Informasi juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritis yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
 - (4) Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan TI dengan rencana pengembangan yang disepakati (*project charter*). Komite Pengarah Teknologi Informasi harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi dapat mengambil keputusan secara efisien.
 - (5) Evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
 - (6) Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur TI dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.

(7) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu

(8) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

c) Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pengarah Teknologi Informasi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap semester dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu. Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas Anggota Komite. Selama tahun 2024 Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat yang dihadiri oleh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi.

d) Periode Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Bank Bumi Arta melakukan peninjauan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi) secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan/perubahan peraturan yang berlaku serta kompleksitas usaha Bank. Pedoman

dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi) terakhir diperbaharui pada tanggal 19 Agustus 2024.

6) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk Direksi di Kantor Pusat untuk memberikan rekomendasi secara objektif kepada Presiden Direktur dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

a) Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko.

Susunan keanggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari :

- (1) Direktur Kepatuhan
- (2) Direktur Kredit & Marketing
- (3) Direktur Pengembangan Bisnis & Keuangan
- (4) Direktur Perbankan Digital
- (5) *General Manager* Keuangan & Akunting
- (6) *General Manager* Kredit
- (7) *General Manager Operation, Treasury & Kredit Support*
- (8) *General Manager* Sumber Daya Manusia & Legal
- (9) *General Manager* Audit Intern/SKAI
- (10) Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko
- (11) Kepala Divisi Luar Negeri
- (12) Kepala Divisi Teknologi Informasi
- (13) Kepala Divisi Operasional & Kredit *Support*
- (14) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
- (15) Kepala Divisi Kebijakan & Prosedur
- (16) Kepala Divisi *Corporate Legal*
- (17) Kepala Divisi *Treasury*

(18) Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

(19) Divisi/Bagian lain yang diundang secara khusus bila diperlukan

b) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur terkait Manajemen Risiko yang meliputi :

- (1) Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
- (2) Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;
- (3) Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

c) Frekuensi rapat Komite Manajemen Risiko.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu. Anggota Komite Manajemen Risiko yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Rapat Komite Manajemen Risiko diselenggarakan jika dihadiri mayoritas Anggota Komite. Selama tahun 2024 Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang dihadiri oleh Anggota Komite Manajemen Risiko.

d) Periode Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko

Bank Bumi Arta melakukan peninjauan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko (Piagam Komite Manajemen Risiko) secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan/perubahan peraturan yang berlaku serta kompleksitas usaha Bank. Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko (Piagam Komite Manajemen Risiko) terakhir diperbaharui pada tanggal 19 Agustus 2024.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Di Bank Bumi Arta Fungsi Kepatuhan dibawahahi oleh Direktur Kepatuhan dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja lainnya. Penugasan Direktur Kepatuhan merupakan wujud komitmen Bank Bumi Arta untuk senantiasa melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas utama Direktur Kepatuhan adalah memastikan seluruh tingkatan organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga petugas pelaksana, mematuhi prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk pengedaran surat edaran, penyampaian arahan dalam pertemuan, maupun pemberian pesan dalam rapat kerja.

Direktur Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan, untuk :

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank membuat Laporan Risiko Kepatuhan dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari unit-unit kerja terkait, yang meliputi aktivitas fungsional perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Informasi Manajemen serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Satuan Kerja Kepatuhan membuat Laporan Risiko Kepatuhan tersebut untuk diberikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam rangka menyusun Laporan Profil Risiko Bank Bumi Arta.

Direktur Kepatuhan dalam rangka memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur pada setiap unit kerja dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Prinsip Kehati-hatian.

Direktur Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Otoritas Jasa Keuangan, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Bank telah memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang sesuai dengan *target date* yang telah ditentukan.

Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank

Tugas Direktur Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan semua jajaran organisasi, baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

Tugas umum ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya : melalui penyampaian surat-surat edaran, pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja.

- 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

Direktur Kepatuhan membuat Surat Keputusan Direksi tentang Pengkajian Kepatuhan dalam rangka melakukan Pengkajian Kepatuhan terhadap pemberian plafond kredit kepada peminjam / kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta menyetujui Pengkajian Kepatuhan yang telah dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan.

- 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan (Pedoman Kepatuhan).

Direktur Kepatuhan menetapkan Pedoman Kepatuhan yang merupakan suatu pedoman yang diperlukan agar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pedoman ini ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Kepatuhan dalam rangka memastikan Bank telah memenuhi seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko melakukan

koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur pada setiap unit kerja dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Prinsip Kehati-hatian.

5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

Dalam rangka meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank, Direktur Kepatuhan meninjau dan menyetujui Laporan Risiko Kepatuhan yang disusun oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Profil Risiko Bank.

6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan

perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Otoritas Jasa Keuangan, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinir, mengarahkan, membina, mengawasi dan mensosialisasikan budaya risiko dan menerapkan budaya ramah lingkungan dalam kegiatan operasional Bank.
- 2) Mengikuti, mempelajari, memahami dan melaksanakan segala peraturan/ketentuan serta prosedur intern yang telah digariskan oleh manajemen intern, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atau instansi lain.
- 3) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- 4) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 5) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Memeriksa dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan ketepatan penyampaian laporan intern maupun ekstern.
- 9) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan/otoritas lain termasuk di dalamnya melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/otoritas lain dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- 10) Menyusun dan menyampaikan Laporan Risiko Kepatuhan Bank kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam rangka menyusun profil risiko Bank.
- 11) Menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi dari Divisi Pemeriksaan Intern/SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta hasil pengawasan otoritas lain untuk penyempurnaan dan perbaikan Satuan Kerja Kepatuhan.
- 12) Melakukan Pengkajian Kepatuhan dalam rangka melakukan pemantauan atas semua penyediaan dana dalam bentuk kredit yang diberikan termasuk produk kredit terkait keuangan berkelanjutan.
- 13) Berkontribusi secara efektif dalam memperbaiki dan mengembangkan Fungsi Kepatuhan, termasuk menghadiri dan memberi masukan pada Rapat yang diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait.

- 14) Memeriksa memo teguran kepada bagian-bagian terkait atas keterlambatan penyampaian laporan atau pelanggaran yang mengakibatkan Bank dikenakan sanksi denda oleh pihak eksternal.
- 15) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 16) Menerapkan Strategi Anti *Fraud* dan melaporkan atau tidak menyembunyikan kejadian *fraud* yang diketahui, memberikan arahan dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *fraud* kepada staf.
- 17) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sepanjang berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan.

Dari hasil pemantauan selama tahun 2024 atas prosedur yang ada maupun kebijaksanaan yang dijalankan selama ini telah memenuhi ketentuan kehati-hatian Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong Rendah.

Track record Kepatuhan Bank selama ini baik dan kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas usaha telah menjadi sikap dasar manajemen Bank Bumi Arta. Sikap dasar tersebut diwujudkan dengan selalu berusaha untuk mematuhi ketentuan kehati-hatian Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat diperbaiki oleh Bank, serta Bank telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku, yang mana di dalam penerapan/implementasi belum dilakukan secara optimal.

b. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern di Bank Bumi Arta dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI merupakan lembaga yang Independen terhadap satuan kerja operasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki hubungan komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Kepala SKAI adalah Lauw Janto, menjabat sebagai Kepala SKAI sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 009/KEP/IV/99/Dir tanggal 13 April 1999 dan terakhir ditetapkan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No.DK/Pers/003/I/2024/Dir tanggal 3 Januari 2024, menyelesaikan pendidikan di Universitas Tarumanagara, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi dan telah mendapat Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 (BSMR) dan *International Certificate in Banking Risk and Regulation (GARP)*, serta *Qualified Internal Auditor (QIA)* pada tahun 2017 dan *Certifies Anti Fraud Manager (CAFM)*.

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Pelaksanaan Audit Intern oleh SKAI mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank pada Bank Umum dan Standar Profesional Audit Intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, Buku Pedoman Pemeriksaan Intern PT Bank Bumi Arta Tbk., Rencana Kerja PT Bank Bumi Arta Tbk. tahun 2024 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Bumi Arta Tbk. tahun 2024.

Secara umum ruang lingkup kerja (*scope*) SKAI adalah meliputi segala kegiatan pemeriksaan secara Independen dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Risiko, Tata Kelola Perusahaan, Teknologi Informasi dan seluruh aktivitas usaha Bank serta kualitas kinerja manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

SKAI pada tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja telah melakukan pemeriksaan tahunan (*annual audit*) atas fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat (*Credit Review, Credit Support, Loan Center, SDM, Kepatuhan, APU, PPT dan PPPSPM, Manajemen Risiko, Luar Negeri dan Teknologi Informasi*), 9 (sembilan) Kantor Cabang, 14 (empat belas) Kantor Cabang Pembantu, 8 (delapan) Kantor Fungsional. SKAI telah melakukan pemeriksaan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia (BI), yaitu pemeriksaan atas SKN-BI, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, BI-FAST dan KPDHN, pemeriksaan tahunan Teknologi Informasi dan pemeriksaan yang diwajibkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu pemeriksaan atas *Sistem Single Customer View (SCV)* secara internal.

Selain pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh SKAI, juga sudah dilaksanakan pemeriksaan teknologi informasi dengan fokus Pengembangan dan Pengadaan Layanan Perbankan Digital yang memerlukan keahlian khusus, maka di dalam pelaksanaannya menggunakan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi, serta Pemeriksaan Bidang Teknologi Informasi terkait Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dengan menggunakan jasa audit eksternal independen yang terdaftar di otoritas atau *Self-Regulatory Organization (SRO)* yaitu Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

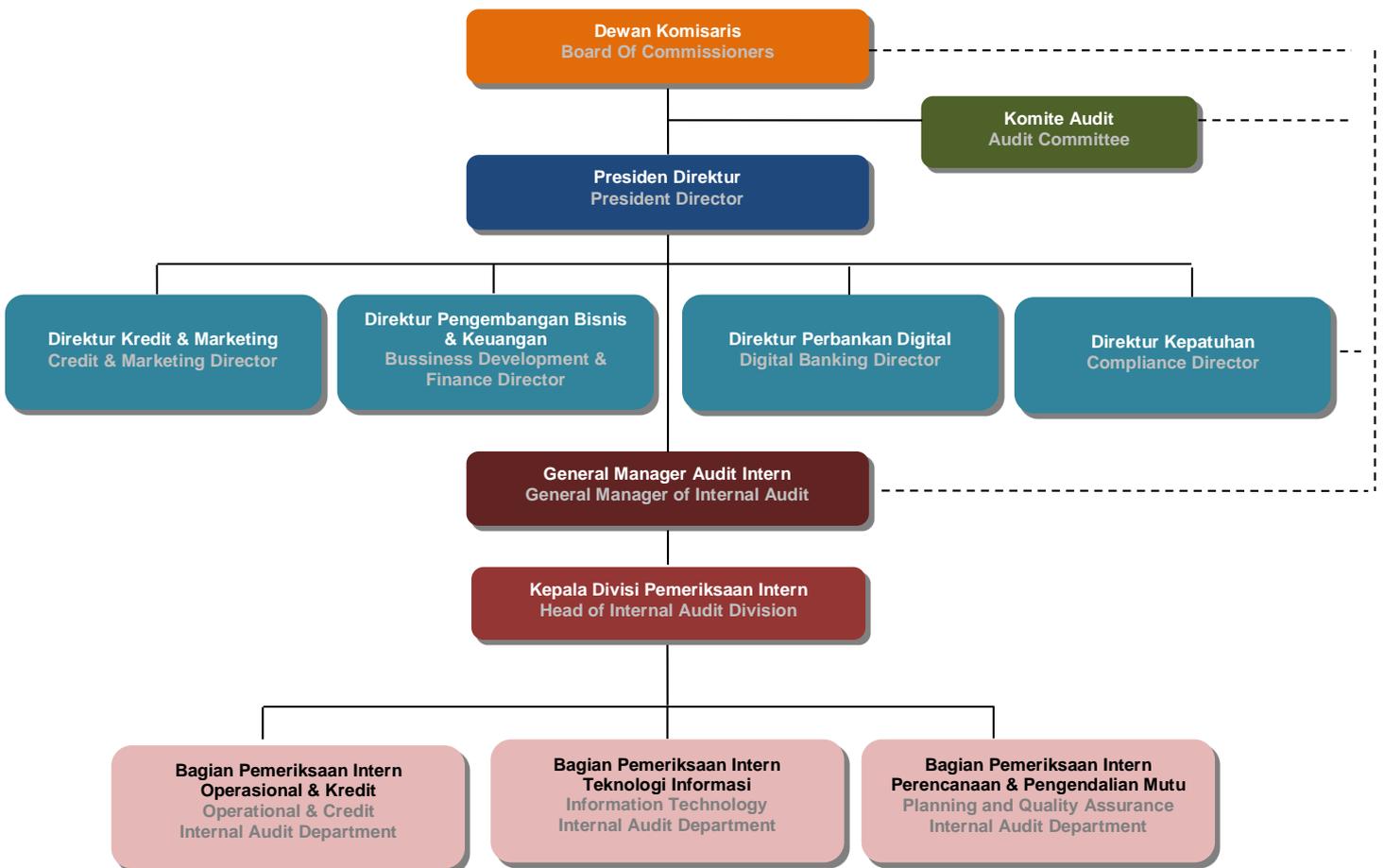
Hasil temuan dan komentar pemeriksaan SKAI dilaporkan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan *Auditee* untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan. Tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh *Auditee* dipantau oleh Bagian Risiko Operasional di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. SKAI juga telah melaporkan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern ke Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk mengembangkan pengetahuan auditor intern, meningkatkan keahlian auditor intern dan untuk mengantisipasi setiap perkembangan baru dalam dunia perbankan, SKAI secara berkesinambungan terus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada auditor intern, baik secara internal maupun eksternal. Pada tahun 2024 anggota SKAI telah mengikuti 62 (enam puluh dua) pelatihan berupa *on the job training, in house training, sosialisasi, webinar, workshop, seminar* dan resertifikasi manajemen risiko.

Efektivitas audit intern sudah berjalan dengan cukup baik, antara lain : audit intern dapat membantu penerapan dan peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern melalui pembenahan pada *core business process* (proses/aktivitas bisnis inti) organisasi yang meliputi Manajemen Umum, Manajemen Rencana Kerja, Manajemen Perkreditan, Manajemen Simpanan, Manajemen Jasa Perbankan, Manajemen Operasional Lainnya, Akuntansi, Pelaporan dan Administrasi Umum, APU PPT dan PPPSPM; audit intern telah melaksanakan fungsinya dalam membantu manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan melalui penyediaan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajemen serta mampu mendeteksi temuan-temuan audit yang kemudian memberikan rekomendasi untuk proses perbaikan kinerja organisasi; dan audit intern secara konsisten mengembangkan

pengetahuan dan meningkatkan keahlian auditor intern, sehingga auditor intern dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan audit intern.

STRUKTUR ORGANISASI SKAI



c. Fungsi Audit Ekstern

Fungsi Audit Ekstern di Bank Bumi Arta dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, anggota PricewaterCoopers (PwC) dan Akuntan Publik Jimmy Pangestu yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dari KAP tersebut adalah melaksanakan audit sesuai dengan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ("standar *auditing* yang berlaku umum").

Tujuan audit tersebut adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai hubungan antara Bank, akuntan publik dan Otoritas Jasa Keuangan telah berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan audit KAP juga mengacu kepada :

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- 5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tanggal 06 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Bank oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik, dalam rangka memastikan dan meyakini bahwa Laporan Keuangan Bank telah disusun dan disajikan secara berkualitas, bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Bank serta menguji keefektifan pengendalian intern Bank.

Secara umum ruang lingkup kerja (*scope*) audit ekstern meliputi :

- 1) Pertimbangan tentang pengendalian intern atas pelaporan keuangan, sebagai dasar untuk menentukan prosedur audit sesuai dengan keadaan, namun bukan dimaksudkan untuk memberikan pendapat tentang keefektifan pengendalian intern Perusahaan atas pelaporan keuangannya.
- 2) Pemeriksaan atas dasar uji, bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
- 3) Tanya jawab kepada manajemen perusahaan dan Komite Audit untuk mengetahui kecurangan atau dugaan kecurangan yang mempengaruhi perusahaan.
- 4) Penilaian prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen.
- 5) Penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Sesuai dengan Kerangka Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank Bumi Arta telah mengimplementasikan struktur Manajemen Risiko yang terpadu yang merupakan sarana dalam menentukan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan dengan baik.

Pada tahun 2024 Bank Bumi Arta terus memperbaiki kemampuan manajemen risiko dengan menyempurnakan Tata Kelola, kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Proses Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Bank Bumi Arta berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko adalah penyusunan profil risiko Bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan. Laporan profil risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko.

Penilaian profil risiko Bank Bumi Arta dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan.

Hasil penilaian risiko komposit Bank Bumi Arta per 31 Desember 2024 adalah *Low to Moderate* yang merupakan kombinasi dari Risiko Inheren Agregat *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*.

a. Risiko Kredit

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Direksi dan Dewan Komisaris menjabarkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi Risiko Kredit serta melakukan pemantauan rencana kerja unit terkait.

Bank telah membentuk Komite Kredit (*credit committee*) di setiap Kantor Cabang dan Komite Kredit Kantor Pusat. Komite Kredit adalah suatu tim kerja yang anggotanya terdiri dari para pejabat kredit. Tugas pokok komite ini adalah menilai suatu usulan kredit serta membuat keputusan kredit.

Bank juga telah membentuk Komite Kebijakan Perkreditan yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan umum dan strategi perkreditan Bank serta memantau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur perkreditan.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Kredit seperti Kebijakan Perkreditan Bank Bumi Arta (KPBBA), Buku Pedoman Kredit dan Prosedur (BPKP), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), Surat Edaran terkait, yang disesuaikan seiring dengan dikeluarkannya ketentuan baru untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada, serta disempurnakan terkait dengan kelemahan yang ditemukan.

Adanya penetapan limit seperti limit komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, limit kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, limit pertanggungan, limit atas rasio keuangan dan *rating depository correspondent* Bank yang selalu disesuaikan dengan perkembangan usaha dan rencana ekspansi kredit.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Bank melakukan analisis terhadap kebutuhan modal usaha, keuangan calon debitur, proyeksi *cash flow* dan lain-lain. Penilaian jaminan telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Kredit/Bagian *Appraisal*.

Bank memiliki sistem *scoring* terhadap *outstanding* kredit dengan batas plafond tertentu.

Fungsi kaji ulang kredit (*loan review*) yang independen telah dilakukan oleh Divisi *Review & Remedial* Kredit Umum sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

Bank telah memiliki Divisi *Review & Remedial* Kredit Umum yang berkoordinasi dengan Cabang dalam proses eksekusi jaminan. Divisi *Review & Remedial* Kredit Umum juga melakukan analisis serta memberikan rekomendasi/opini penyelesaian kredit bermasalah dan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) kepada Direksi serta mem-*follow up* penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA tersebut. Bank telah menunjuk staff Bagian Kredit Pensiun yang akan melaksanakan fungsi *remedial*.

Bank mulai mengidentifikasi *country risk*, *transfer risk* serta risiko terkait iklim terhadap eksposur Bank yang berdampak pada Risiko Kredit.

Laporan perkembangan kredit termasuk pelaporan Risiko Kredit disampaikan secara rutin kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Bagian Risiko Operasional dan pemantauan SKAI secara berkala.

b. Risiko Pasar

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan dan strategi Risiko Pasar serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan Risiko Pasar dalam rapat *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) minimal sebulan sekali.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Pasar seperti Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan Surat Edaran yang terkait Risiko Pasar yang menetapkan ketentuan penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dan kredit, yang disesuaikan seiring dengan dikeluarkannya ketentuan baru untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada.

Adanya penetapan limit seperti limit volume dan komposisi portofolio, limit kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book*, *limit sensitivity to market risk*, limit dampak risiko terkait iklim terhadap eksposur/portofolio Bank, limit PDN, *intraday limit*, *cut loss limit*, *dealer limit* dan lain-lain.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Pasar dilakukan melalui analisis perkembangan suku bunga pasar dan kurs valuta asing serta melakukan pemantauan dengan menggunakan *repricing gap* untuk mengetahui posisi *Risk Sensitivity Asset (RSA)* terhadap *Risk Sensitivity Liabilities (RSL)* secara berkala.

Setiap bulan Bank melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* dengan menggunakan metode NII Gap (*Net Interest Income Gap*) dimana dilakukan pemetaan posisi aset, kewajiban dan rekening administratif yang disusun berdasarkan asumsi *repricing time* yang telah ditentukan oleh Bank.

Bank mulai mengidentifikasi risiko terkait iklim pada eksposur Bank yang berdampak pada Risiko Pasar.

Laporan yang terkait dengan Risiko Pasar dilaporkan dalam rapat ALCO dan dilaporkan kepada Direksi minimal sebulan sekali.

Sehubungan dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum, Bank telah melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko

Pasar dengan menggunakan metode *Simplified Standardised Approach* sejak posisi akhir bulan Januari 2024.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Pasar dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh SKAI secara berkala.

c. Risiko Likuiditas

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi Risiko Likuiditas yang dilakukan dalam rapat *Assets & Liabilities Management Committee* (ALCO) minimal sebulan sekali.

Bank telah membentuk Komite Kredit *Treasury* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menentukan pasar, instrumen, serta transaksi dengan *eligible counterparty*.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Likuiditas yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Pedoman Likuiditas Bank Bumi Arta, yang disesuaikan seiring dengan dikeluarkannya ketentuan baru untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada.

Adanya penetapan limit seperti limit komposisi dari aset, liabilitas dan transaksi rekening administratif, limit konsentrasi dari aset dan liabilitas, limit kerentanan pada kebutuhan pendanaan, limit akses pada sumber pendanaan, limit dampak risiko terkait iklim terhadap nasabah Bank dan limit rasio likuiditas lainnya.

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Likuiditas dilakukan melalui analisis *maturity profile*, *cash flow*, perkembangan Dana Pihak Ketiga dan aset serta rasio Likuiditas. Bank melakukan analisis Dana Pihak Ketiga dan *stress test* likuiditas terhadap permodalan Bank secara berkala.

Bank mulai mengidentifikasi risiko terkait iklim pada eksposur Bank yang berdampak pada Risiko Likuiditas.

Laporan yang terkait likuiditas secara komprehensif telah dilaporkan kepada Direksi secara harian dan dalam rapat ALCO.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh SKAI secara berkala.

d. Risiko Operasional

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan dan evaluasi kebijakan dan strategi Risiko Operasional secara periodik.

Direksi telah menyetujui kebijakan dan prosedur pengelolaan Risiko Operasional. Kebijakan dan strategi operasional sudah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank.

Bank telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank dan kesesuaian pelaksanaannya.

Rencana Bank dalam transformasi digital yang meningkatkan pemanfaatan TI akan berpotensi meningkatkan Risiko Operasional yang ditimbulkan oleh ancaman dan insiden siber. Penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank serta penyelenggaraan TI secara menyeluruh oleh Bank.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Operasional seperti Buku Pedoman Penggunaan Teknologi Sistem Informasi (BPPTSI), Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (PPMRPTI), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) dan Surat Edaran yang terkait.

Adanya penetapan limit seperti limit karakteristik dan kompleksitas bisnis, limit sumber daya manusia, limit teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, limit *fraud*, limit kejadian eksternal, limit keamanan siber, limit dampak risiko terkait iklim terhadap operasional Bank, limit transaksi, limit mata uang, limit SWIFT dan lain-lain.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Operasional dilakukan melalui analisis data kejadian operasional, rasio BOPO, kepatuhan Bank terhadap program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) dan lain-lain.

Bank telah mengidentifikasi keamanan siber dan mulai mengidentifikasi risiko terkait iklim pada eksposur Bank yang berdampak pada Risiko Operasional.

Laporan yang terkait dengan Risiko Operasional dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
Pengendalian Risiko Operasional dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Bagian Risiko Operasional dan pemantauan SKAI secara berkala.

e. Risiko Hukum

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur yang di dalamnya mencakup Risiko Hukum. Kebijakan dan strategi Bank telah memperhatikan faktor eksternal dan internal Bank. Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang di dalamnya mencakup Risiko Hukum.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Hukum yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank Bumi Arta (KPBBA), Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi (PPMRPTI), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), Surat Edaran dan Surat Keputusan serta Peraturan Perusahaan, yang disesuaikan seiring dengan dikeluarkannya ketentuan baru untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada.

Adanya penetapan limit seperti limit litigasi/perkara hukum yang dihadapi Bank, limit kelemahan perikatan dan limit ketiadaan/perubahan perundang-undangan.

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Hukum dilakukan antara lain melalui analisis kasus hukum yang dihadapi Bank, faktor kelemahan perikatan dan faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan. Risiko Hukum Bank telah dipantau secara rutin.

Kantor Cabang membuat laporan bulanan mengenai ada/tidaknya tuntutan atau gugatan hukum yang dialami Cabang dan dikirimkan ke Divisi *Corporate Legal*. Laporan yang terkait dengan Risiko Hukum dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh SKAI secara berkala.

Bank telah mempunyai Divisi *Corporate Legal* dan Bagian Legal Kredit di Kantor Pusat. Peran Divisi *Corporate Legal* antara lain mereview kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain/nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melakukan analisa kasus hukum yang dihadapi Bank. Sedangkan, peran Bagian Legal Kredit adalah turut mereview pelaksanaan perjanjian terkait kredit.

f. Risiko Reputasi

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif memberikan persetujuan dan melakukan evaluasi berkala atas kebijakan dan prosedur dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi. Kebijakan dan strategi Risiko Reputasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan konsumen.

Bank telah membentuk fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dan menunjuk *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab memberikan informasi/penjelasan yang dibutuhkan kepada nasabah dan pihak ekstern lainnya.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Reputasi yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), kebijakan dan prosedur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta penanganan pengaduan nasabah untuk meminimalkan Risiko Reputasi akibat publikasi negatif terhadap Bank yang tertuang dalam Surat Edaran, yang disesuaikan seiring dengan dikeluarkannya ketentuan baru untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada.

Adanya penetapan limit seperti limit pengaruh reputasi dari pemilik Bank dan perusahaan terkait, limit pelanggaran etika bisnis, limit kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank, limit frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif Bank dan/atau pengurus Bank, limit frekuensi dan materialitas keluhan nasabah dan limit frekuensi dan materialitas reputasi negatif dan/atau pengaduan nasabah Bank sebagai dampak risiko terkait iklim.

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Reputasi dilakukan melalui analisis frekuensi dan dampak dari keluhan nasabah dan publikasi negatif Bank.

Bank mulai mengidentifikasi risiko terkait iklim pada eksposur Bank yang berdampak pada Risiko Reputasi.

Laporan yang terkait dengan Risiko Reputasi dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh SKAI secara berkala.

g. Risiko Strategik

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur terkait Risiko Strategik. Kebijakan dan strategi operasional sudah mempertimbangkan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan kondisi eksternal Bank. Dalam rencana strategik dan rencana bisnis dicantumkan tentang produk atau aktivitas baru yang akan diluncurkan.

Bank telah membentuk Tim Pelaksana Penyusun Anggaran dan Rencana Bisnis Bank (TIM PPA dan RBB) guna membantu Direksi dalam penyusunan Anggaran dan Rencana Bisnis Bank termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Strategik yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), pedoman penyusunan anggaran yang dituangkan secara tertulis dalam Surat Edaran dan Memo Antar Kantor yang digunakan untuk penyusunan *Corporate Plan*/Rencana Bisnis, yang

disesuaikan seiring dengan dikeluarkannya ketentuan baru untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada.

Adanya penetapan limit seperti limit kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, limit strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, limit posisi bisnis Bank dan limit pencapaian atas Rencana Bisnis Bank.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Strategik dilakukan melalui analisis pencapaian rencana strategik (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*).

Bank telah membentuk Tim Pemantau Realisasi Anggaran dan Rencana Bisnis Bank (Tim PRA dan RBB) guna memantau dan mengevaluasi realisasi atas anggaran dan Rencana Bisnis Bank.

Laporan pengelolaan Risiko Strategik telah disusun dan disampaikan kepada Direksi sebulan sekali. Laporan Realisasi Rencana Bisnis telah disusun dan disampaikan kepada Direksi sebulan sekali dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulanan.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
Pengendalian Risiko Strategik dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh SKAI secara berkala.

h. Risiko Kepatuhan

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris memahami Risiko Kepatuhan, dimana dilakukan evaluasi secara berkala atas kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Kepatuhan yang ada telah disetujui oleh Direksi.

Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Direksi telah mewajibkan seluruh satuan kerja untuk mematuhi ketentuan internal dan eksternal yang berlaku dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Pedoman Kepatuhan, Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan Surat Edaran, yang disesuaikan seiring dengan dikeluarkannya ketentuan baru untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada.

Penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan ditujukan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, seperti limit

Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM), serta limit yang ditetapkan sehubungan dengan transaksi Valuta Asing meliputi pemenuhan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN) dan lain-lain, limit frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidakpatuhan Bank dan limit pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui analisis kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan institusi lainnya.

Bank telah memantau secara rutin Risiko Kepatuhan berdasarkan identifikasi atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan mengevaluasi secara berkala atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dilaporkan kepada Direksi sebulan sekali. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan. Laporan Kepatuhan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris secara semesteran.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Bagian Risiko Operasional dan pemantauan SKAI secara berkala.

5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (juta Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	13	114.400 ¹
2	Kepada Debitur Inti :	15	1.453.612
	a. Individu	7	748.682
	b. Group	8	704.930

¹ Pemberian kredit kepada Pihak Terkait sejumlah Rp 114.400 juta dijamin dengan *cash collateral* sejumlah Rp 48.909 juta sehingga penyediaan dana yang diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Terkait sebesar Rp 65.491 juta.

6. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank Bumi Arta disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Penyusunan Rencana Korporasi berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, serta Rencana Bisnis berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) Bank Bumi Arta disusun secara realistis, komprehensif dan terukur, dengan memperhatikan tingkat risiko komposit dalam sistem pengendalian risiko strategis (*Risk Control System-Strategic Risk*). Proses ini juga memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsivitas terhadap perubahan internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kelangsungan operasional Bank.

Penyusunan Rencana Korporasi Bank Bumi Arta didasarkan pada analisis lingkungan eksternal yang mencakup faktor ekonomi makro, tren bisnis perbankan, dan kemajuan teknologi informasi, serta analisis lingkungan internal yang meliputi perkembangan kredit dan dana pihak ketiga. Sementara itu, Rencana Bisnis disusun berdasarkan kebijakan dan strategi Bank Bumi Arta, termasuk kebijakan manajemen, Manajemen Risiko dan kepatuhan, strategi pengembangan bisnis, antisipasi terhadap perubahan eksternal, pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan remunerasi. Rencana ini juga didukung oleh analisis SWOT, analisis makro dan mikro,

serta pertimbangan kondisi eksternal, internal, dan situasi perbankan nasional.

Direksi telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh tingkatan organisasi yang ada pada Bank serta melaksanakan semua rencana dan target yang ditetapkan secara efektif.

Untuk memastikan implementasi rencana yang telah disusun, pencapaian target jangka menengah dan target jangka pendek dalam Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank, Direksi senantiasa memantau pencapaiannya secara berkala. Hasil pemantauan terkait Rencana Bisnis Bank dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan.

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, melalui laporan realisasi Rencana Bisnis Bank yang disampaikan oleh manajemen dan Rapat Dewan Komisaris untuk mengevaluasi dan memberikan pengarahannya kepada Direksi. Hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap Rencana Bisnis Bank dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.

Pencapaian rencana strategis Bank yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank diarahkan pada upaya pencapaian 3 (tiga) target/fokus utama kegiatan usaha, yaitu meningkatkan pertumbuhan kredit, memelihara tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dan meningkatkan dana pihak ketiga.

Untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, Bank akan terus menjajaki peluang di sektor-sektor yang memiliki prospek positif dengan tingkat risiko yang dapat diukur serta fokus memberikan kredit kepada peminjam dengan potensi usaha menjanjikan dan memiliki daya tahan yang terbukti dalam menghadapi berbagai siklus ekonomi. Selain itu Bank juga akan mengembangkan pembiayaan segmen komersial melalui pendekatan *value chain financing*, baik melalui *distributor financing* maupun *supplier financing* serta fokus pada perusahaan-perusahaan di sektor industri yang sedang berkembang.

Dalam rangka menurunkan tingkat NPL, Bank akan menerapkan langkah-langkah preventif, termasuk pemantauan yang lebih intensif terhadap penggunaan kredit serta perkembangan usaha debitur. Jika terdapat penurunan dalam kinerja usaha debitur yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, Bank akan melakukan koordinasi dengan debitur untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Selain itu Bank juga akan mengembangkan layanan perbankan digital untuk menghimpun dana pihak ketiga terutama dari nasabah retail dengan jangkauan yang lebih luas di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2024, kredit Bank Bumi Arta mencapai sebesar Rp 4.477.789 juta, naik sebesar Rp 558.335 juta atau sebesar 14,25%, jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 3.919.454 juta.

Sedangkan kualitas Kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) sebesar 3,65% (*gross*) dan 2,30% (*net*).

Simpanan Bank Bumi Arta pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp 4.798.663 juta naik sebesar Rp 101.901 atau (2,17%) dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 4.696.762 juta. Peningkatan simpanan berasal dari Giro sebesar Rp 38.528 juta atau (6,11%), Tabungan sebesar Rp 14.297 juta atau (4,28%) dan Deposito sebesar Rp 49.076 juta atau (1,32%).

7. Kebijakan Dividen

Bank telah memiliki Kebijakan Dividen yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 20 Desember 2024.

Dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham, Bank wajib mendasarkan atas berbagai pertimbangan antara lain:

- a. Pertimbangan internal, yakni terkait dengan Bank, antara lain:
 - 1) Realisasi kinerja keuangan;
 - 2) Rencana Pertumbuhan Bisnis;
 - 3) Prospek profitabilitas yang akan datang;
 - 4) Tingkat kesehatan Bank;
 - 5) Pemenuhan tingkat kecukupan permodalan;
 - 6) Potensi risiko dari internal Bank;
 - 7) Kebutuhan penguatan permodalan di masa depan.

- b. Pertimbangan eksternal, antara lain:
 - 1) Kondisi dan prospek perekonomian (*market wide*);
 - 2) Potensi risiko dari eksternal Bank;
 - 3) Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain perpajakan;
 - 4) Arahan dan masukan dari otoritas pengawas atau regulator;
 - 5) Masukan atau aspirasi dari pemegang saham (investor).

Bank menetapkan besaran dividen yang diberikan sebagai berikut:

- a. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen Bank berdasarkan keputusan RUPS.
- b. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- c. Pembagian dividen harus dapat mendukung dan memperhatikan terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Bank yang sehat dan menjaga kesinambungan kinerja Bank dan *Return of Investment* bagi pemegang saham.
- d. Perhitungan dividen wajib didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar.
- e. Usulan dan pelaksanaan pembagian dividen wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Bank.

Sedangkan mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen adalah sebagai berikut:

- a. Rencana pembagian dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan memperhatikan pertimbangan baik secara internal maupun eksternal.
- b. Direksi membahas dan mengusulkan penggunaan laba bersih untuk dividen pada rapat Direksi.
- c. Usulan penggunaan laba bersih disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan pemegang saham.

Berdasarkan keputusan yang dihasilkan dalam RUPS Tahunan pada 19 Juni 2024, Bank Bumi Arta memutuskan untuk tidak membagikan dividen tunai atas laba tahun buku 2023. Namun demikian, Bank telah menetapkan alokasi penyisihan Cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 Anggaran Dasar Bank sebesar Rp2.500 juta.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Bank Bumi Arta telah menyajikan seluruh kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan dalam seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak ekstern.

9. Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank

Selama tahun 2024, tidak ada intervensi pemilik, tidak ada perselisihan internal, serta tidak ada permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank Bumi Arta yang dapat mengganggu jalannya kelangsungan usaha dan kinerja Bank.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (Lima Persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank Bumi Arta, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Ir. Rachmat M.S., MBA selaku Presiden Komisaris memiliki saham biasa sebanyak 20,07% saham pada PT Dana Graha Agung.²
2. I Gst Agung Rai Wirajaya selaku Komisaris memiliki saham biasa sebanyak 10,00% saham pada PT Midaz Digital Ventura, sebanyak 10,00% saham pada PT Puri Kuta Beach dan sebanyak 7,69% saham pada PT BPR Santi Pala.
3. Hendrik Atmaja selaku Direktur Kredit dan Marketing memiliki saham biasa sebanyak 21,11% saham pada PT Surya Husada Investment³ dan sebanyak 10,00% saham pada PT Arta Tritunggal Jaya.

² PT Dana Graha Agung merupakan pemegang saham pada PT Bank Bumi Arta Tbk sebesar 17,72%.

³ PT Surya Husada Investment merupakan pemegang saham pada PT Bank Bumi Arta Tbk sebesar 29,53%.

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris Lain, Pemegang Saham Pengendali Bank, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan/Hubungan Keluarga
Ir. Rachmat M.S., MBA	Presiden Komisaris	Memiliki hubungan keluarga dengan Hendrik Atmaja, Direktur Kredit & Marketing serta Edwin Suryahusada, Direktur Pengembangan Bisnis & Keuangan, serta tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali Bank, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank. ⁴
Daniel Budi Dharma	Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali Bank, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank.
R.M. Sjariffudin	Komisaris/ Komisaris Independen	Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali Bank, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank.
I Gst Agung Rai Wirajaya	Komisaris	Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali Bank, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank.
Wikan Aryono S	Presiden Direktur	Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, Pemegang Saham Pengendali Bank, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank.

⁴ Ir. Rachmat M.S, MBA adalah Pemegang Saham Pengendali Terakhir.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan/Hubungan Keluarga
Hendrik Atmaja	Direktur Kredit & Marketing	Memiliki hubungan keluarga dengan Ir. Rachmat M.S., MBA, Presiden Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank, serta Edwin Suryahusada, Direktur Pengembangan Bisnis & Keuangan, serta tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, Pemegang Saham Pengendali Bank, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank.
Edwin Suryahusada	Direktur Pengembangan Bisnis & Keuangan	Memiliki hubungan keluarga dengan Ir. Rachmat M.S., MBA, Presiden Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank, serta Hendrik Atmaja, Direktur Kredit & Marketing, serta tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, Pemegang Saham Pengendali Bank, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank.
Aditya Putra Utama	Direktur Perbankan Digital	Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, Pemegang Saham Pengendali Bank, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank.
John David Nehemia Engelen	Direktur Kepatuhan	Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, Pemegang Saham Pengendali Bank, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank.

D. Kebijakan Remunerasi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi

- a. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi yang digabung menjadi satu dengan Komite Nominasi sebagai Komite Remunerasi dan Nominasi dengan susunan sebagai berikut :
 - 1) Daniel Budi Dharma sebagai Ketua dan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
 - 2) Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA. sebagai Anggota dan menjabat sebagai Presiden Komisaris, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
 - 3) Jenny sebagai Anggota dan menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, serta memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia.

- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait Remunerasi adalah :
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
 - 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a) Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- b) Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - 3) Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;
 - 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
- c. Selama periode tahun 2024 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 4 (empat) kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara fisik maupun telekonferensi.
- d. Remunerasi yang telah Dibayarkan kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Selama tahun 2024.
- Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2024 adalah Rp 3.987 juta. Remunerasi tersebut sudah termasuk gaji/honorarium dan tunjangan yang diberikan terkait dengan jabatan masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Bumi Arta.

2. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

a. Latar Belakang Kebijakan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Bumi Arta sudah memiliki dan menerapkan kebijakan remunerasi yang mencakup remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai. Kebijakan remunerasi tersebut disusun dengan berbagai pertimbangan yang meliputi terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas

keuangan Bank, kecukupan dan penguatan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang dan potensi pendapatan di masa yang akan datang.

b. Tujuan Kebijakan Remunerasi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Menjaga dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kualitas kerja yang baik dan produktif.
- 3) Menciptakan persaingan positif dalam rangka memotivasi pegawai untuk terus mengembangkan diri.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia.
- 5) Menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

c. Pelaksanaan Kaji Ulang atas Kebijakan Remunerasi

Bank secara berkala melakukan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.

d. Mekanisme Kebijakan Remunerasi

Bank memastikan evaluasi kinerja dan penentuan remunerasi dilakukan melalui pengawasan dan kajian yang mendalam oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Upaya ini dilakukan guna memastikan independensi pemberian remunerasi terhadap seluruh karyawan termasuk karyawan di unit control.

3. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per Unit Bisnis, Perwilayah dan pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi di Luar Negeri

Hingga 31 Desember 2024, Bank tidak memiliki kantor cabang diluar negeri.

4. Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Jenis risiko utama dalam kebijakan remunerasi disesuaikan dengan kajian terhadap profil risiko Bank yang ditentukan setiap tahunnya dengan melihat kondisi pasar, perkembangan industri, kinerja dan kemampuan keuangan Bank. Adapun risiko utama Bank yaitu Risiko Kredit.

Penetapan jenis risiko utama akan berdampak ke penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) dan berdampak pada pemberian Remunerasi yang bersifat variabel. Hingga tahun 2024, belum terdapat perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun lalu.

5. Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Bank menetapkan penilaian kinerja dengan pendekatan *Key Performance Indicators* (KPI) dan *Performance Appraisal*. KPI untuk mengukur serta menilai pencapaian kinerja pegawai dalam memenuhi target dan tujuan yang telah disepakati, sedangkan *Performance Appraisal* untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai dengan berdasar pada aspek kompetensi yang telah ditetapkan.

6. Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Remunerasi yang diberikan dalam bentuk :

- a. Tunai; dan
- b. Saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, yang berlaku untuk Direksi, Dewan Komisaris dan *Material Risk Taker*.

Remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham bagi Komisaris Independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai.

Pemberian Remunerasi dalam bentuk saham Bank dihitung dari persentase tertentu atas gratifikasi yang diberikan yaitu sebanyak 10%.

Sebagian remunerasi variabel yang diberikan kepada *Material Risk Taker* baik tunai maupun saham harus ditangguhkan selama 3 tahun, yang pencairannya dibagi secara prorata sesuai jangka waktu. Besarnya remunerasi variabel yang ditangguhkan adalah sebesar 10% untuk remunerasi tunai dan 10% untuk remunerasi dalam bentuk saham. Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk semua *Material Risk Taker*.

Dalam hal Bank mengalami kerugian, Bank dapat tidak membagikan atau membagikan dengan nilai yang relatif kecil.

7. Konsultan Ekstern Terkait Kebijakan Remunerasi

Hingga tahun 2024, Bank tidak melibatkan konsultan eksternal dalam menentukan kebijakan remunerasi.

8. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima tahun 2024			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah
1. Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura	5	11.907	4	4.165
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	5	762	1	105
Total	5	12.669	4	4.270

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima tahun 2023			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah
1. Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura	5	11.385	4	3.972
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
c. dapat dimiliki	-	-	-	-
d. tidak dapat dimiliki	5	734	1	88
Total	5	12.119	4	4.060

9. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	2024		2023	
	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	3	-	3	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	2	1	2	1
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	3	-	3
Rp 500 juta ke bawah	-	-	-	-

*)Yang diterima secara tunai.

10. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Remunerasi yang bersifat variabel diberikan dalam bentuk :

- a. Tunai; dan
- b. Saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, yang berlaku untuk Direksi, Dewan Komisaris dan *Material Risk Taker*.

Tidak terdapat perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel diantara Direksi, Dewan Komisaris dan *Material Risk Taker*.

11. Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel adalah sebagai berikut :

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah yang Diterima tahun 2024					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	3	1.470	4	750	593	12.658

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah yang Diterima tahun 2023					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	3	1.457	3	750	587	10.544

12. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Takers*

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Takers* adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris Non Independen
- b. Direksi
- c. *General Manager*
- d. Kepala Divisi Kredit Umum
- e. Pemimpin Cabang

Total seluruh *Material Risk Takers* sebanyak 25 orang.

13. *Shares Option*

Shares Option merujuk pada hak yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank untuk membeli saham Bank. Opsi ini dilakukan melalui penawaran saham atau tawaran opsi saham sebagai bagian dari program kompensasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank, yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.

Pada tahun 2024, Bank Bumi Arta tidak melaksanakan program *Shares Option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pejabat Eksekutif Bank, maka dengan demikian:

- a. Bank Bumi Arta belum memiliki kebijakan dalam pemberian *Shares Option*.
- b. Tidak ada *Shares Option* yang diberikan.
- c. Tidak ada *Shares Option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan.
- d. Tidak ada harga Opsi yang diberikan.
- e. Tidak ada jangka waktu berlakunya eksekusi *Shares Option*.

14. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya.

Keterangan dibawah ini menjelaskan mengenai rasio gaji di Bank, dimana gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dibawah ini adalah imbalan yang diterima per bulan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai tetap Bank adalah sebagai berikut :

Keterangan	Rasio Gaji	
	2024	2023
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	49,70	52,37
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,57	1,37
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	2,85	2,71
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,36	1,25

15. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan oleh Bank kepada Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai Selama 1 (Satu) Tahun Pertama Bekerja

Tidak ada remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat kepada calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

16. Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan adalah sebagai berikut :

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang	Jumlah Pegawai	
	2024	2023
Di atas Rp 1 miliar	2	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	4
Rp 500 juta ke bawah	11	19

17. Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank adalah sebagai berikut :

Dalam juta Rp

Jumlah Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan	Jumlah yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun	
	2024	2023
Tunai	275	221
Saham	275	221

18. Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan

Total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan di tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunai Rp 275 juta.
- b. Dalam bentuk saham Rp 275 juta.

19. Jumlah Remunerasi yang Diberikan

Rincian Jumlah Remunerasi yang diberikan meliputi :

- a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun remunerasi yang bersifat variabel;
- b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan;
- c. bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)				
	2024		2023	
Tunai	30.758		22.452	
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-		-	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)				
	2024		2023	
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	1.099	275	882	221
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	1.099	275	882	221

*) Hanya untuk MRT dan dalam juta rupiah

20. Informasi Kuantitatif

Informasi Kuantitatif mengenai :

- a. total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
- b. total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
- c. total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Sisa Yang Masih Ditangguhkan		Total Pengurangan Selama Periode Laporan					
			Disebabkan Penyesuaian Eksplisit		Disebabkan Penyesuaian Implisit		Total	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Tunai	521	436	-	-	-	-	-	-
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	521	436	-	-	-	-	-	-

*) Hanya untuk MRT dan dalam juta rupiah

E. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar lebih optimal maka Dewan Komisaris mengadakan pertemuan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang mana rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi (antara lain melalui *telekonferensi*).

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 24 (dua puluh empat) kali pertemuan dimana 16 (enam belas) kali pertemuan dihadiri secara fisik dan telekonferensi oleh anggota Dewan Komisaris dan 8 (delapan) kali pertemuan tanpa kehadiran Presiden Komisaris.

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam pertemuan selama tahun 2024.

Dewan Komisaris (Tanggal)	Tw 1			Tw 2		
	18/01/24	21/02/24	06/03/24	25/04/24	13/05/24	12/06/24
Ir. Rachmat M.S., MBA	-	V V V V*	V*	-	V V *	V V *
Daniel Budi Dharma	V	V V V V	V	V V	V V	V V
R.M. Sjariffudin	V	V V V V	V	V V	V V	V V
I Gst Agung Rai Wirajaya	V	V V V V	V	V V	V V *	V V *

Dewan Komisaris (Tanggal)	Tw 3			Tw 4	
	10/07/24	21/08/24	12/09/24	30/10/24	20/12/24
Ir. Rachmat M.S., MBA	V V V*	V V V*	-	V*	-
Daniel Budi Dharma	V V V	V V V	V V	V	V V V
R.M. Sjariffudin	V V V	V V V	V V	V	V V V
I Gst Agung Rai Wirajaya	V V *	V V V	V V	V*	V V V

*telekonferensi

F. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Pada tahun 2024, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank, dengan demikian :

1. Tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang telah diselesaikan.
2. Tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank.
3. Tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang belum diupayakan penyelesaiannya.
4. Tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

(satuan)

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

G. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2024, terdapat 10 (sepuluh) permasalahan hukum perdata dan 1 (satu) permasalahan hukum pidana, dengan pokok perkara adalah 10 (sepuluh) terkait kredit dan 1 (satu) permasalahan hubungan industrial, namun tidak mengganggu jalannya kelangsungan usaha dan kinerja Bank.

Adapun 4 (empat) permasalahan hukum perdata telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta yang masih dalam proses penyelesaian adalah 6 (enam) permasalahan hukum perdata dan 1 (satu) permasalahan hukum pidana.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang menghadapi kasus hukum/perkara hukum.

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah Mendapatkan Putusan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	4	-
Dalam Proses Penyelesaian	6	1
Total	10	1

H. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Bumi Arta, apabila terdapat transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham dan kepentingan ekonomis Bank, maka Direksi harus memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sepanjang tahun 2024, Bank Bumi Arta tidak melakukan transaksi benturan kepentingan yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.

I. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank

Sepanjang tahun 2024, Bank Bumi Arta tidak menerbitkan obligasi dan tidak melakukan *Buy Back Shares* atau membeli kembali saham yang telah diterbitkan oleh Bank, dengan demikian :

1. Bank Bumi Arta belum memiliki kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) Saham dan/atau Obligasi Bank.
2. Tidak ada saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
3. Tidak ada harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi.
4. Tidak ada peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

J. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik

Sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta lingkungan hidup dan pelestarian alam, selama tahun 2024 Bank Bumi Arta :

1. Melakukan kegiatan donor darah yang melibatkan partisipasi karyawan Bank yang berada di Jakarta dengan biaya sebesar Rp 20.000.000,-.
2. Ikut berpartisipasi dalam Project Penanaman dan Pemeliharaan Pohon dengan menanam 1.000 (seribu) bibit pohon bakau (*Rhizophora sp Mangrove Seeds*) di Dusun Tangkolak, Karawang, Jawa Barat bertajuk “Aksi Nyata BBA: 1.000 Bibit Mangrove untuk Dusun Tangkolak” dengan biaya sebesar Rp 96.250.000,-.
3. Membangun kamar mandi umum di Dusun Tangkolak, Karawang dengan biaya sebesar Rp 15.850.000,-.

Bank Bumi Arta tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank Bumi Arta tahun 2024 adalah sebagai berikut :

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Manajemen Bank Bumi Arta telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang secara keseluruhan sudah baik. Penerapan ini tercermin dari pemenuhan yang memadai terhadap prinsip-prinsip tersebut. Meskipun ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola, secara umum, dampaknya tidak terlalu signifikan dan dapat diatasi oleh Manajemen Bank. Dengan komitmen yang kuat, Manajemen terus berupaya meningkatkan kualitas Tata Kelola demi mencapai tujuan yang lebih baik.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa :

A. Governance Structure

1. Faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :
 - a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang disempurnakan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- Jumlah, komposisi dan kompetensi anggota Komite sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Penanganan Benturan Kepentingan
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tertuang dalam peraturan perusahaan, Kebijakan Perkreditan BBA (KPBBA) serta Surat Edaran Bank.
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.

- Pengangkatan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern
- Bank telah memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Buku Pedoman Pemeriksaan Intern (BP2I).
 - SKAI Bank merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan.
- h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
 - Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR).
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), yang tertuang dalam Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

- j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola serta Pelaporan Internal
- Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
 - Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Tersedianya pelaporan internal yang memadai dan informasi yang akurat dan tepat waktu.
 - Terdapat sistem informasi yang andal dan IT *security system* yang memadai.
- k. Rencana Strategis Bank
- Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.
 - Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.

B. Governance Process

1. Faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris.
- Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi penerapan prinsip Tata Kelola dan telah berjalan efektif.
- Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan efektif.
- Hasil rapat Komite terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite dituangkan pada suatu memorandum kepada Dewan Komisaris.
- Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Komite.

d. Penanganan Benturan Kepentingan

Tidak terdapat benturan kepentingan.

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dan mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.

f. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek.
- Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.
- Rencana pemeriksaan SKAI Bank pada tahun 2024 telah terealisasi semua.
- SKAI telah melakukan fungsi pemeriksaan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Direksi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS atas rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
- Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Direksi telah menyusun dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan yang ditemukan oleh SKAI, serta telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko kepada seluruh jenjang organisasi.
 - Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko yang tertuang dalam Himbauan/Memorandum Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan dalam pelaksanaannya masih terus ditingkatkan.
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)
- Bank telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola serta Pelaporan Internal
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada

Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bank telah mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan, serta memasukkan data dan informasi sesuai dengan temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- Tidak terdapat perbedaan peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (*self assessment*) pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.

k. Rencana Strategis Bank

- Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
- Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank telah berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan telah memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan Manajemen Risiko dan asas perbankan yang sehat.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

2. Faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah :

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Masih terdapat 2 (dua) komitmen Bank pada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pusat posisi 30 Juni 2024 dengan target waktu Desember 2024 yang masih dalam proses penyelesaian.

C. *Governance Outcome*

1. Faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga, remunerasi dan fasilitas lain serta opsi saham (*share option*) yang dimiliki dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.
- Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga, remunerasi dan fasilitas lain serta opsi saham (*share option*) yang dimiliki dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.
 - Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- Risalah rapat Komite telah didokumentasikan dengan baik.
 - Komite-komite yang ada telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- d. Penanganan Benturan Kepentingan
- Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern
- Direksi telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.
 - SKAI telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.
 - Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai.

- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.
- h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
 - Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
 - Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)
- Tidak ada pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - Diversifikasi portofolio penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
 - Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola serta Pelaporan Internal

- Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank secara lengkap dan tepat waktu.
- Bank telah menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dalam situs web secara tepat waktu.
- Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank telah dilaksanakan dengan baik.

k. Rencana Strategis Bank

- Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats/SWOT Analysis*).
- Bank telah memperbaiki Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank dengan lebih memperhatikan kesesuaiannya dengan rencana strategis Bank.
- Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank.

2. Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah :

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Masih terdapat denda pada tahun 2024 terkait pelanggaran terhadap ketentuan, walaupun tidak signifikan.

b. Penerapan Fungsi Audit Intern

Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan *Auditee*. Masih terdapat beberapa temuan yang sifatnya sama tetapi telah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh *Auditee*.

c. Rencana Strategis Bank

Rencana Bisnis Bank hampir tercapai

Realisasi Rencana Bisnis Bank terkait Laba Kotor telah mencapai 114,92%, sedangkan untuk Aset telah mencapai 93,67%, Kredit telah mencapai 98,01% dan Dana Pihak Ketiga telah mencapai 89,28%.

Rencana Bisnis Bank terkait Kredit yang belum tercapai sebesar 1,99% terutama karena debitur cukup hati-hati dalam menggunakan kredit yang diberikan. Walaupun keadaan perekonomian global cukup baik, namun ketidakpastian Kebijakan Perekonomian Pemerintah saat ini masih belum dirasakan oleh debitur.

Sedangkan Dana Pihak Ketiga yang belum tercapai sebesar 10,72% karena adanya beberapa nasabah mencairkan dananya untuk dipergunakan transaksi bisnis dan juga merupakan strategi Bank dalam menjaga Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank sebesar 85% sampai 94%.

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.	Jumlah anggota Direksi sebanyak 5 orang.
b. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.
c. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
d. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
e. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
f. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
g. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>h. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.</p>	<p>Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang disempurnakan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.</p>
<p>i. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	<p>Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.</p>
<p>j. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p>	<p>Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p>
<p>k. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga.</p>	<p>Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga.</p>
<p>l. Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>m. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab .</p> <p>n. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>o. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>p. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain dengan mengikuti seminar, training dan resertifikasi manajemen risiko.</p> <p>Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain dengan mengadakan <i>training intern</i> maupun ekstern di berbagai bidang dengan mengikutsertakan karyawan pada seminar / <i>training</i> / <i>workshop</i> serta sertifikasi / <i>refreshment</i> manajemen risiko.</p> <p>Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan yang ada.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
2. Governance Process	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.
b. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
c. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
d. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
e. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap Pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
f. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
g. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris. Masih terdapat 2 (dua) komitmen Bank pada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan di Kantor Pusat posisi 30 Juni 2024 dengan target waktu Desember 2024 yang masih dalam proses penyelesaian.

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>h. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris antara lain Laporan Keuangan, Profil Risiko, Rencana Bisnis, Laporan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan lain-lain.</p>
<p>i. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p>	<p>Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p>
<p>j. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p>	<p>Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib yang berlaku.</p>
<p>k. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p>	<p>Direksi telah menyempurnakan ketentuan internal yang mengatur pelaksanaan rapat Direksi.</p>
<p>l. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>
<p>m. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>	<p>Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
<p>n. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>	<p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
b. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.
c. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai seperti Buku Peraturan Perusahaan dan Surat Edaran Manajemen.
d. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank di dalam Rapat Direksi.
e. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>f. Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank; 3) remunerasi dan fasilitas lain; 4) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. <p>g. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p> <p>h. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.</p>	<p>Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola tahun 2024, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemilikan saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank; 3) remunerasi dan fasilitas lain; 4) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. <p>Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang di dapat melalui seminar/<i>training/workshop</i> dan sertifikasi dapat meningkatkan kinerja Bank, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bank dan mencapai hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p> <p>Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang di dapat melalui seminar/<i>training/workshop</i> dan sertifikasi dapat meningkatkan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>i. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>j. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	<p>Adanya peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
1. Governance Structure	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p> <p>b. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p> <p>c. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>d. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tata Kelola Bank Umum, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri atau • merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank; • Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau • Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. 	<p>Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang dan Direksi sebanyak 5 (lima) orang.</p> <p>Mayoritas anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p> <p>2 (dua) dari 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank Bumi Arta tidak merangkap jabatan di Bank Bumi Arta, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, kecuali Ir. Rachmat M.S., MBA yang saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Surya Husada Investment dan I Gst Agung Rai Wirajaya yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Puri Kuta Beach dan khusus sebagai anggota Komisi XI DPR RI di DPR/MPR RI masih dirangkap sampai dengan 30 September 2024.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
e. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di Bank yang sama.	Rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) ketua komite pada Bank yang sama, yaitu Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
f. Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.	3 (tiga) dari 4 (empat) orang Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.
g. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
h. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
i. Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun.	Tidak ada Komisaris Independen yang perlu menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>).
j. Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum ada Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen.

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>k. Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai Independensinya dalam RUPS.</p> <p>l. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>m. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>n. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p>Pengangkatan terakhir dari 2 (dua) Komisaris Independen adalah pada RUPS Tahunan pada tanggal 19 Juni 2024 dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.</p> <p>Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.</p> <p>Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain dengan mengikuti seminar, <i>refreshment</i> manajemen risiko serta penyeteraan dan penyelarasan sertifikasi Manajemen Risiko.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>o. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>p. Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</p>
2. Governance Process	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS</p> <p>b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>d. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p>	<p>Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>e. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p>	<p>Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank.</p>
<p>f. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p>
<p>g. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p>	<p>Selama tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p>
<p>h. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p>	<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p>
<p>i. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	<p>Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>
<p>j. Pengangkatan anggota komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>Pengangkatan anggota komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>
<p>k. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memastikan komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>i. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>m. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p> <p>n. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>o. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>p. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>q. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>	<p>Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>Selama tahun 2024, telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dimana 16 (enam belas) rapat dihadiri secara fisik dan telekonferensi oleh seluruh Dewan Komisaris dan 8 (delapan) rapat dihadiri secara fisik tanpa kehadiran Presiden Komisaris. Rapat Dewan Komisaris telah dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris</p> <p>Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris periode tahun 2024 telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.</p> <p>b. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>c. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>d. Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank; 3) remunerasi dan fasilitas lain; 4) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris. 	<p>Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi yang tertuang dalam memorandum.</p> <p>Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Dewan Komisaris telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemilikan saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank; 3) remunerasi dan fasilitas lain; 4) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris.

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>e. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p> <p>f. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
1. <i>Governance Structure</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a. Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. 2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 3) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. 4) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 	<p>Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, akuntansi dan manajemen risiko dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum. 2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 3) Anggota Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen. 4) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>b. Komite Pemantau Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. 2) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. 3) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. 4) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <p>c. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan pegawai. 2) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi, serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank. 	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, akuntansi dan manajemen risiko dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan dan manajemen risiko. 2) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. 3) Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. 4) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia. 2) Pejabat Eksekutif anggota Komite memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem nominasi dan/atau remunerasi, serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>4) Dalam hal jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>5) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka :</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.</p> <p>d. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>e. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p>	<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>4) 1 (satu) dari 3 (tiga) anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.</p> <p>5) Bank tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.</p> <p>Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>f. Seluruh pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>g. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p> <p>h. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p>	<p>Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>Seluruh Pihak Independen bukan berasal dari mantan Anggota Direksi Bank Bumi Arta. Adapun Pihak Independen yang berasal dari Pejabat Eksekutif Bank Bumi Arta melakukan fungsi pengawasan sehingga tidak perlu menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p> <p>Rapat Komite Audit dihadiri oleh semua anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Selain itu juga dihadiri oleh SKAI untuk memberikan penjelasan program kerja audit yang telah dilaksanakan, termasuk hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian intern.</p> <p>Rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh semua anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Selain itu juga dihadiri oleh SKMR untuk memberikan penjelasan mengenai profil risiko Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>i. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>j. Komposisi komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh semua anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.</p> <p>Komposisi komite telah memenuhi ketentuan yang ada.</p>
2. Governance Process	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap : <ol style="list-style-type: none"> a) pelaksanaan tugas SKAI; b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit; c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan 	<p>Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap : <ol style="list-style-type: none"> a) pelaksanaan tugas SKAI; b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>b. Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>1) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p>	<p>d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Komite Audit telah membuat laporan hasil evaluasi terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3) Komite Audit memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>1) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, melalui laporan hasil penilaian profil risiko Bank dan informasi terkait lain yang terekspos risiko, antara lain : permasalahan kompetensi Sumber Daya Manusia, kelengkapan sarana dan prasarana operasional Kantor Cabang.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>c. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) Direksi dan Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada RUPS; b) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. 2) Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 3) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 4) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris. 	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) Direksi dan Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada RUPS; b) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. <p>Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi remunerasi.</p> 2) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 3) Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Komisaris Independen. 4) Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris.

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>d. Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>e. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>f. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>g. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p>	<p>Selama tahun 2024 telah diselenggarakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Komite Audit sebanyak 15 (lima belas) kali, • Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 12 (dua belas) kali, dan • Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) kali. <p>Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Hasil rapat komite terhadap hal-hal yang menjadi perhatian komite dituangkan pada suatu memorandum kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas komite.</p>
3. Governance Outcome	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a. Pembuatan risalah rapat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p>	<p>Risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
b. Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.	Masing-masing komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
1. <i>Governance Structure</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai :</p> <p>a. benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;</p> <p>b. administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</p>	<p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tertuang dalam peraturan perusahaan, Kebijakan Perkreditan BBA (KPBBA) serta Surat Edaran Bank.</p>
2. <i>Governance Process</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Tidak ada benturan kepentingan.</p>
3. <i>Governance Outcome</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>b. Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Tidak ada benturan kepentingan.</p> <p>Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
c. Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	Tidak ada benturan kepentingan.

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
1. Governance Structure	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>b. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>c. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>
2. Governance Process	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :</p> <p>1) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p>	<p>Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas :</p> <p>1) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>b) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p>	<p>Telah dibuat Surat Edaran Manajemen No. 108 tanggal 25 Juli 2017 perihal Budaya Kepatuhan, dimana dalam Surat Edaran tersebut dikemukakan “Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Semua staf dan karyawan Bank harus memahami bahwa mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus selalu mematuhi ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar dalam pelaksanaan tugas tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.</p> <p>b) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p> <p>Dalam rangka memantau dan menjaga usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menerbitkan Memo Intern, Memo Antar Kantor kepada unit-unit kerja terkait dan Bagian Sistem dan Prosedur serta memberikan pengkajian kepatuhan atas semua penyediaan dana dalam bentuk kredit yang diberikan (<i>exposure group</i> > 5 milyar).</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>3) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p>	<p>3) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.</p> <p>Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan semua jajaran organisasi, baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.</p> <p>Untuk itu telah dibuat Surat Edaran Manajemen No. 108 tanggal 25 Juli 2017 perihal Budaya Kepatuhan.</p>
<p>4) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p>	<p>4) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang tertuang dalam Budaya Kepatuhan, Pedoman Kepatuhan, serta Pengkajian Kepatuhan.</p>
<p>5) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p>	<p>5) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan (Pedoman Kepatuhan).</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menetapkan Pedoman Kepatuhan yang merupakan suatu pedoman yang diperlukan agar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan sebagaimana mestinya.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>6) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p>	<p>Pedoman ini ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.</p> <p>6) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur pada setiap unit kerja dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian.</p> <p>7) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank. Dalam rangka meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memberikan persetujuan atas Laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan serta memberikan saran kepada manajemen baik secara lisan maupun tertulis melalui Memo Intern jika terdapat hal-hal yang masih harus dilakukan perbaikan.</p>

**FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>8) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p>	<p>8) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dilakukan dengan pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja serta pemberian Pengkajian Kepatuhan.</p> <p>9) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau, otoritas pengawas lain yang berwenang.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>b. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>c. Direksi telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; 2) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; 3) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. <p>d. Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; 	<p>Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Direksi telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank yang tertuang dalam Pedoman Kepatuhan; 2) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; 3) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. <p>Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; Satuan Kerja Kepatuhan melakukan koordinasi dengan unit – unit kerja terkait di Kantor Pusat dalam rangka melakukan sosialisasi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara lisan maupun tertulis melalui Memo Intern, Memo Antar Kantor, pemberian <i>training</i>, dsbnya;

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>2) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i> dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;</p> <p>3) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>2) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari unit-unit kerja terkait, yang meliputi aktivitas fungsional perkreditan, <i>treasury</i> dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Informasi Manajemen serta pengelolaan Sumber Daya Manusia.</p> <p>Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau hal-hal yang masih harus dilakukan perbaikan maka Satuan Kerja Kepatuhan akan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait secara lisan maupun tertulis melalui memo intern.</p> <p>Satuan Kerja Manajemen Risiko menerima laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka menyusun laporan profil/komposisi risiko dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.</p> <p>3) Satuan Kerja Kepatuhan telah menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian;</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>4) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan</p> <p>6) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi Kepatuhan.</p>	<p>4) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, dengan membuat Memo Intern kepada Divisi Kebijakan & Prosedur maupun Unit Kerja terkait untuk dilakukan pembuatan / <i>review</i> / pengkinian / penyempurnaan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur tersebut;</p> <p>5) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan koordinasi dan <i>monitoring</i> atas pembuatan/<i>review</i>/pengkinian/penyempurnaan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah dikinikan atau disempurnakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>6) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan seperti :</p> <p>a) Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas semua penyediaan dana dalam bentuk kredit yang diberikan (<i>exposure group</i> > Rp 5 milyar) dalam rangka Pengkajian Kepatuhan;</p> <p>b) Satuan Kerja Kepatuhan membantu pelaksanaan tugas Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
	Otoritas Jasa Keuangan/Otoritas Lain termasuk di dalamnya melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Otoritas Lain dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.</p> <p>b. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</p> <p>c. Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.</p>	<p>Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.</p> <p>Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p> <p>Masih terdapat denda pada periode tahun 2024 terkait pelanggaran terhadap ketentuan, walaupun tidak signifikan.</p> <p>Bank telah membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank serta perlu terus ditingkatkan.</p> <p>Bank telah menindaklanjuti temuan OJK berdasarkan LHP Umum PT Bank Bumi Arta. Tbk Kantor Pusat posisi 31 Januari 2023 dan 30 Juni 2024 serta Kantor Cabang Medan posisi 30 Juni 2024. Masih terdapat 2 (dua) komitmen Bank pada OJK berdasarkan LHP Kantor Pusat posisi 30 Juni 2024 dengan target waktu Desember 2024 yang masih dalam proses penyelesaian.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.	Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan : 1) menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>); 2) membentuk SKAI; 3) menyusun panduan audit intern.	Bank telah memiliki : 1) Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>); 2) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); 3) Buku Pedoman Pemeriksaan Intern (BP2I).
c. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	SKAI Bank merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional.
d. Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank telah menyediakan sumber daya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan SKAI.
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Direksi bertanggung jawab atas : 1) terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; dan 2) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.	Direksi bertanggung jawab atas : 1) terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; 2) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.

**FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<p>b. Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>d. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>e. Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>f. Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>g. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>h. SKAI telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; 2) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; 3) kualitas kinerja. 	<p>Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>SKAI Bank telah menyusun Rencana Pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan yang memadai.</p> <p>Rencana pemeriksaan SKAI Bank pada tahun 2024 telah terealisasi semua.</p> <p>Sumber daya manusia SKAI Bank telah mengikuti pelatihan secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>SKAI telah melakukan fungsi pemeriksaan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>SKAI telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; 2) efektivitas Sistem Pengendalian Bank; 3) kualitas kinerja.

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<p>i. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.</p> <p>j. SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>k. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.</p>	<p>SKAI telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan temuan hasil pemeriksaan tahunan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, SPBI dan KPDHN, SCV, PJP dan pemeriksaan tahunan TI dengan menggunakan jasa pihak ekstern (PT Xynexis International).</p> <p>SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>SKAI telah melakukan pengkinian Buku Pedoman Pemeriksaan Intern terkait dengan perubahan Struktur Organisasi SKAI di Bank.</p>
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>b. Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p> <p>c. SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>	<p>Direksi telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan <i>Auditee</i>. Masih terdapat beberapa temuan yang sifatnya sama tetapi telah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh <i>Auditee</i>.</p> <p>SKAI telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<p>d. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.2) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan3) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal.	<p>Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.2) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern dan3) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

G. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik paling sedikit memenuhi aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; b. legalitas perjanjian kerja; c. ruang lingkup audit; d. standar profesional akuntan publik; dan e. komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 	<p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan.</p>
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<ol style="list-style-type: none"> a. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. b. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. c. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 	<p>Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2024, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, anggota PricewaterhouseCoopers (PwC) dan Akuntan Publik Jimmy Pangestu yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Direksi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS atas rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

G. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
<p>d. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>e. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>f. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>g. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.</p> <p>b. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.</p> <p>c. Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>	<p>Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>b. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.</p>	<p>Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR).</p>
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain :</p> <p>1) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;</p>	<p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain :</p> <p>1) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan, yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR). Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;</p>

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<p>2) menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko;</p> <p>3) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>4) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>5) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>6) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p>	<p>2) menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko;</p> <p>3) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>4) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko, yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan kebijakan internal Bank.</p> <p>5) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>6) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p>

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<p>7) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan;</p> <p>8) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>9) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>10) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>11) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p>	<p>7) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala;</p> <p>8) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>9) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>10) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>11) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<p>b. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);2) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.	<p>Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>), yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR);2) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko;3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala, yang tertuang dalam Himbauan/ Memorandum Dewan Komisaris kepada Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

FAKTOR PENILAIAN:
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
c. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.	Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan dalam pelaksanaannya masih terus ditingkatkan.
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.	Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
b. Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.	Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
c. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.

FAKTOR PENILAIAN:
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

I. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), yang tertuang dalam Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
b. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
c. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.	Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.

FAKTOR PENILAIAN:
 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

I. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)	
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah :</p> <p>1) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan;</p> <p>2) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>b. Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>	<p>Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah :</p> <p>1) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran /diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
b. Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.	Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	Tersedianya pelaporan internal yang memadai dan informasi yang akurat dan tepat waktu.
d. Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.	Terdapat sistem informasi yang andal dan IT <i>security system</i> yang memadai. Kebutuhan akan kompetensi sumber daya manusia yang selalu berubah, disebabkan pesatnya perkembangan digitalisasi sehingga diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk menciptakan <i>security</i> yang handal.

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL	
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.</p>	<p>Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>b. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; 2) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; 3) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; 4) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan informasi produk; 5) Informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; 6) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; 7) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; 8) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut. 	<p>Bank telah mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>c. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>d. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.</p> <p>e. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.</p> <p>f. Dalam hal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mempublikasikannya pula pada situs web Bank.</p> <p>g. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank :</p> <p>1) Melakukan revisi paling sedikit terhadap Peringkat Faktor Tata Kelola dan Definisi Peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; dan</p>	<p>Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.</p> <p>Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan, serta memasukkan data dan informasi sesuai dengan temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya.</p> <p>Tidak terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>2) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assesment</i>) pada situs web Bank.</p>	
3. Governance Outcome	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>b. Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi :</p> <p>1) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; dan</p> <p>2) Laporan Tahunan</p> <p>c. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) serta paling sedikit mencakup :</p> <p>1) Prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan tata kelola;</p>	<p>Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi :</p> <p>1) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; dan</p> <p>2) Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya, sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>).</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<p>2) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>3) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>4) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>5) Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh bank;</p> <p>6) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>7) Pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/atau obligasi Bank;</p> <p>8) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> <p>d. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank.</p> <p>e. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>f. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>g. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>	<p>Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>Bank telah menyajikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank telah dilaksanakan dengan baik.</p> <p>Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
1. <i>Governance Structure</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>b. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<p>Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>Bank telah menyampaikan <i>Corporate Plan</i> sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>
2. <i>Governance Process</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
<p>a. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>b. RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>c. Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemegang saham Bank; dan 2) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. <p>d. Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif.</p> <p>e. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) faktor ekstern dan faktor intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; 2) prinsip kehati-hatian; 3) penerapan Manajemen Risiko; 4) asas perbankan yang sehat. <p>f. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.</p> <p>g. Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<p>Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p> <p>Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif.</p> <p>Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank telah berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) faktor ekstern dan faktor intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; 2) prinsip kehati-hatian; 3) penerapan Manajemen Risiko; 4) asas perbankan yang sehat. <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>Pemilik telah menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
3. <i>Governance Outcome</i>	
Kriteria/Indikator	Analisis
a. Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
b. Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
c. RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	<p>Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p> <p>Realisasi Rencana Bisnis Bank terkait Laba Kotor telah mencapai 114,92%, sedangkan untuk Aset telah mencapai 93,67%, Kredit telah mencapai 98,01% dan Dana Pihak Ketiga telah mencapai 89,28%.</p> <p>Rencana Bisnis Bank terkait Kredit yang belum tercapai sebesar 1,99% terutama karena debitur cukup hati-hati dalam menggunakan kredit yang diberikan. Walaupun keadaan perekonomian global cukup baik, namun ketidakpastian Kebijakan Perekonomian Pemerintah saat ini masih belum dirasakan oleh debitur.</p> <p>Sedangkan Dana Pihak Ketiga yang belum tercapai sebesar 10,72% karena adanya beberapa nasabah mencairkan dananya untuk dipergunakan transaksi bisnis dan juga merupakan strategi Bank dalam menjaga <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Bank sebesar 85% sampai 94%.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK

K. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>d. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.</p> <p>e. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis</i>).</p> <p>f. Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.</p>	<p>Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.</p> <p>Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis</i>).</p> <p>Rencana strategis Bank telah didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.</p> <p>Bank telah memperbaiki Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank dengan lebih memperhatikan kesesuaiannya dengan rencana strategis Bank.</p>
<p>g. Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>h. Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.</p>	<p>Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank.</p> <p>Permodalan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>